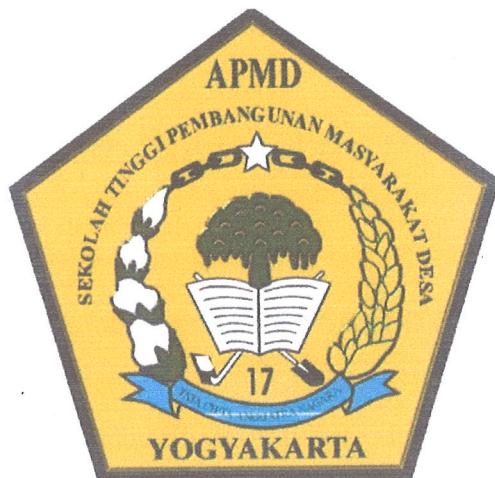


**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI
KALURAHAN WIROKERTEN KEPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**ANSARUDIN
19520077**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI
KALURAHAN WIROKERTEN KEPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

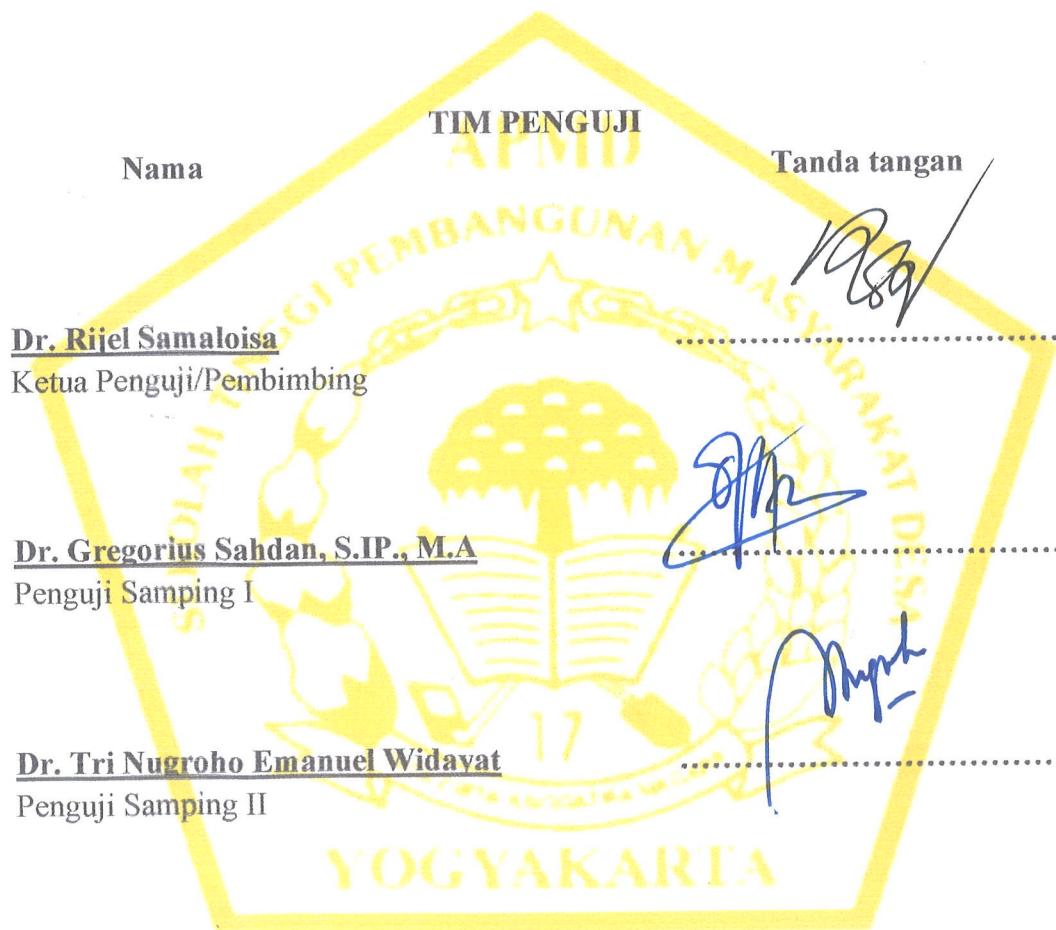


PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

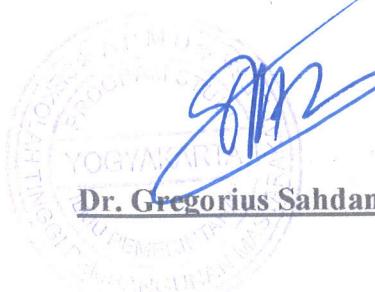
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025
Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ansarudin

Nim : 19520077

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa, penelitian diskriptif kualitatif di Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah di disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Peneliti,



Ansarudin
19520077

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ansarudin
Nim : 19520077
Telp : 081228430460
Email : okhyansar@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Starata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2025
Yang membuat pernyataan


Ansarudin
19520077

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh ummat di dunia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat rahmat dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Mohamad Firdaus, S.IP., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Dr. Rijel Samaloisa selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Hastowiyono, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah membantu, memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Kalurahan Wirokerten, Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat Wirokerten yang telah memberikan tempat dan waktu untuk peneliti melaksanakan penelitian.

Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, mudah- mudahan skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 16 Juni 2025
Peneliti,



Ansarudin
19520077

MOTTO

"Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."

(QS At-Taubah: 40)

"Sholat (berdoa) dan usaha (belajar) adalah kekuatanmu di dunia dan akhirat"

(Umar Hamsi)

"Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Maka pastikanlah arah dari pada

kecepatan."

(Ansarudin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Di tengah keterbatasan ekonomi dan ketertinggalan pendidikan keluarga, capaian ini merupakan kehormatan dan kebanggaan besar bagi diri saya dan keluarga. Untuk itu, dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Umar Hamsi dan Siti Hasna yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu senantiasa mendo'akan, menasehati saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Berkat Segala dukungan do'a, finansial dan cinta yang tiada terbatas sehingga akhirnya saya sampai di titik penyelsaian penulisan skripsi ini. Mungkin saya tidak dapat membalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan ini, mudah-mudahan langka kecil ini bisa menghadirkan senyum dan senang di wajah dan hati mereka, kerena saya sadar selama ini saya belum bisa berbuat lebih. Semoga allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang bagi kedua orang tua saya agar dapat menemani, melihat langka kecil saya kedepan bersama kaka dan adik kandung saya tercinta Iqsan dan Nur aini sampai sukses.
2. Nenek dan keluarga saya yang tercinta Ine Safia, Du'a Muskan, (alm) Amkoe Hasanudin, Amkoe Aziz, Amkoe Solo, Amkoe Burhanudin selaku orangtu saya yang telah memberikan dukungan materil, nasehat untuk terus berkembang, mengasah diri dan mengedepankan etika di setiap lingkungan serta pulang ketanah kelahiran setelah studynya selsai. Terima kasih banyak atas semua niat baik dan dukungan keluarga pada saya.
3. Saudara-saudara saya: Iqsan, Hardin, Ainun Ma'arif, Harsono, Ranto, Sugi Hardini, Didit Suprianto, Asmiranda. Nur aini, Ira, Asgar, Aqil Pratama, Belkis yang selalu menjadi pengingat dan semangat bagi keberhasilan saya selama Study serta keluarga besar Kenari dan Warloka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si dan Bapak Dr. Rijel Samaloisa S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam menyelsaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh Pendidikan.
6. Kepada keluarga besar Komisariat GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta atas ilmu dan pengalaman yang berharga dan bermanfaat. Senior-senior GMNI yang saya banggakan dan bisa mengenal Sarinah Resa, Bung Muis, Sarinah Mumun, Sarinah Diana, Bung Taufik, Bung Ama lebih khusus Bung Verlin T. S Waruwu terima kasih atas dedikasi dan ilmunya.
7. Kepada keluarga besar IKMMIKOM-Y yang telah membentuk karakter dan pola pikir saya serta mengajarkan saya pentingnya kebersamaan di tanah perantauan. Senior-senior dan junior di IKMMIKOM-Y yang telah banyak memberikan nasehat dan pertanyaan “kapan wisuda? dan tutor junior cepat sidang dong kak!” ; kae achmad amirudin, kae Juned, kae Yusran, kae Refan aziz, toa Ismail, kae M. Wisnu Alma Hendra, kae Wandra, kae Hardin, Kae Iksan, kae Farid, kae Bahdin, kae Darwis, kae Erwin R. Brani, kae Fardi, kae Hamka, Kae Irwan syafii, kae Nining, Kae Wulan, kae Kikin, kae Vivi, kae Ainun, kae Mega, kae Indri, ase Fara, ase ainun, ase Zainal Arifin, ase Erda, ase Fitra, ase Astrid, ase Burhan, ase Mufli, ase Yudi, ase Suharto, ase Aldi, ase Riki, ase Zimi, ase Rusman, ase Ikin, ase fadli, ase Syarif, ase Rian, ase Anggi, ase eche, ase iche, ase Anggri, ase Pira, Ase ainun, ase Emy, ase Inul, ase Indra dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.
8. Kepada teman-teman se-angkatan saya mulai dari SMP, MAN Labuan Bajo dan Kuliah yang selalu memberikan pundak bagi setiap orang yang membutukan sandaran, saling menolong, bercanda dan main bersama; Haris Mandala Putra, Suryadi, Suaib, Muhamad Ikram, Zainal Fadilah, Fiki Ramlani, Taufik Bahri, Ilhamsujana, Sultan Abdul Hamid, Wahyudi senjaya, Hasbullah A.P.N, Ayu Wandira, Astrid Purnawati, Windi Febriyany, Kiki kuspo, Angriaini, Fitri Ardianti, Intan Santika, Ulfa, fatikha Avirah Rahmawati, Ravika Duri, Ika, Nurdianti, Sujana, Kamaria Ratu Harapan, Surianti, Emilia, Siti Marliani dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan semuanya terimakasih atas perjuangan, pengalaman yang telah dilewatkan, kebersamaan selalu menjadi ingatan dan memory kenangan.

9. Kepada teman-teman kampus prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 STPMD “APMD” Yogyakarta; Moh Yazid, Muh Malik, Mulyadin, Donartus, Muh Amin, Hendrik sani, Danar, Charles, Suster Dian, Gibran, Yanto, Gendi, Ivan, Ijun saya senang dan bangga bisa berkenalan di tanah perantauan ini, duduk sambil berbagi ilmu dan pengalaman masing-masing serta menghargai setiap pendapat dalam mengkaji pelbagai isu. Terimah kasih atas semuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat akademis	9
2. Manfaat Praktis	10
D. Fokus Penelitian	10
E. Literatur Review	11
F. Kerangka Konseptual	18
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa	18
2. Pemerintah	27
3. Pemerintah Desa	30

4. <i>Governing</i>	33
G. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Unit Analisis	36
3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
4. Keabsahan Data.....	43
5. Teknis Analisis Data	43
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN WIROKERTEN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL	44
A. Sejarah Kalurahan Wirokerten	44
B. Data Umum	46
1. Tipologi Kalurahan	46
C. Kondisi Geografis	47
1. Luas dan batas wilayah	47
2. Orbitrasi.....	47
D. Kondisi Demografis	48
1. Penduduk berdasarkan jenis kelamin	48
2. Penduduk berdasarkan usia.....	49
3. Penduduk berdasarkan Agama	50
4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	52
6. Sarana dan Prasarana.....	54
D. Keadaan Budaya & Sosial.....	58
E. Keadaan Ekonomi	59
F. Keuangan Kalurahan Wirokerten.....	60
G. Lembaga Pemerintahan Desa.....	62

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI KALURAHAN WIROKERTEN	71
A. Membangkitkan kesadaran masyarakat akan peran dan potensi diri (<i>Awakening</i>) di Wirokerten	74
B. Meningkatkan pemahaman kolektif tentang proses dan tantangan pemberdayaan (<i>understanding</i>) di Wirokerten	83
C. Menggali dan mengelola potensi lokal sebagai sumber kekuatan masyarakat (<i>harnessing</i>) di Wirokerten	98
D. Menerapkan hasil pemberdayaan dalam kehidupan bermasyarakat (<i>using</i>) di Wirokerten	111
E. Faktor Pendukung dan Penghambat	128
BAB IV PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139
DOKUMENTASI INFORMAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	37
Tabel 2. 1 Lurah Kalurahan Wirokerten	44
Tabel 2. 2 Lurah Berdasarkan Tahun	46
Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan	46
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel 2. 5 Penduduk Berdasarkan Usia	50
Tabel 2. 6 Penduduk Berdasarkan Agama	50
Tabel 2. 7 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
Tabel 2. 8 Penduduk Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 2. 9 Prasarana Kesehatan	54
Tabel 2. 10 Prasarana Pendidikan	55
Tabel 2. 11 Prasarana Ibadah	56
Tabel 2. 12 Prasarana Umum	57
Tabel 2. 13 Pendapatan Kalurahan Wirokerten	61
Tabel 2. 14 Data Personil Kalurahan Wirokerten	65
Tabel 2. 15. Daftar Bidang Pemberdayaan Wirokerten	69

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wirokerten 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Wirokerten	48
Gambar 3. 1 Pelatihan Pengelolaan Sampah.....	77
Gambar 3. 2 UMKM Wirokerten.....	90
Gambar 3. 3 Pelatihan Leadership Karang Taruna	93
Gambar 3. 4 Perkebunan Hidroponik Kalurahan Wirokerten.....	107
Gambar 3. 5 Desa Wisata Wirokerten Raih Penghargaan	115
Gambar 3. 6 Pasar Blumbang Mataram	127

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Wirokerten. Pemerintah pusat mendukung desa-desa di indonesia dengan menyalurkan dana bagi setiap desa untuk mengelola wewenang dan aset desa. Fokus utamnya adalah pemberdayaan masyarakat menurut konsep Terry Wilson dari keempat tahap pemberdayaan *awakening*, *understanding*, *harnessing* dan *using* serta pemerintah desa melaksanakan fungsi governing dalam mengatur, mengurus, dan memberdayakan masyarakat secara mandiri, serta implementasi program berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi dan penggunaan dana yang tersedia.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui 1) observasi, 2) wawancara, 3) studi dokumentasi. Dengan pendekatan purposive, pemerintah desa, masyarakat desa, tokoh masyarakat dipilih sebagai informan penelitian. Reduksi data, penyajian, verifikasi, dan investigasi semuanya termasuk dalam analisis data. Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta, yang menjadi locus penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap *awakening*, pemerintah desa berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, forum warga, dan libelatian dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh bahwa mereka memiliki hak, peran, dan kemampuan untuk ikut serta dalam pembangunan. Ini adalah fondasi penting dalam proses pemberdayaan yang mendorong partisipasi aktif dan pembentukan identitas kolektif sebagai warga yang memiliki agensi. Tahap *understanding* menunjukkan bahwa setelah masyarakat sadar, mereka juga memahami bagaimana struktur, tantangan, dan peluang pembangunan desa bekerja. Mereka tidak hanya tahu bahwa mereka penting, tetapi juga memahami bagaimana menggunakan peran tersebut secara strategis. Pemerintah desa juga semakin memahami pentingnya sinergi antara kebijakan *top-down* dan kebutuhan *bottom-up*. Hambatan seperti keterbatasan literasi, partisipasi semu, dan komunikasi antarwarga mulai dikenali dan dicarikan solusinya. Selanjutnya, tahap *harnessing* menggambarkan proses penting dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya yang ada di desa, baik sumber daya manusia, alam, sosial, maupun kultural. Masyarakat dan pemerintah desa mulai menggali potensi tersebut, mengorganisasi dalam bentuk kelompok usaha, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan sektor informal. Kegiatan seperti pelatihan UMKM, pemanfaatan lahan kosong, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda menunjukkan bahwa masyarakat mulai mampu mengorganisasi dirinya. Dalam tahap *using*, masyarakat telah mulai mempraktikkan hasil pemberdayaan dalam kehidupan nyata. Berbagai inisiatif warga, mulai dari pembentukan usaha kecil, koperasi wanita, hingga pengembangan produk lokal menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah menjadi bagian dari kultur baru di Kalurahan Wirokerten. Penggunaan teknologi oleh pemuda untuk pemasaran digital dan penggunaan hasil usaha PKK untuk mendanai kegiatan sosial menjadi indikator kuat bahwa pemberdayaan berjalan secara substansial. pemberdayaan bukanlah proses instan. Ia menuntut waktu, ketekunan, dan kebijakan yang fleksibel. Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dilewati begitu saja. Kesadaran tanpa pemahaman akan menimbulkan partisipasi semu; penggalian potensi tanpa kesadaran akan memunculkan ketergantungan baru; dan penggunaan hasil tanpa penguatan kelembagaan akan mudah rapuh.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Governing Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa memberikan harapan baru bagi keberlangsungan kehidupan desa di seluruh Indonesia sebagai entitas lokal yang dihargai dan diakui dengan prinsip *rekognisi* dan *subsidiaritas*-nya. Oleh kerena itu sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan membangun Indonesia dari daerah terpencil, dengan memperkuat desa-desa di seluruh Indonesia. Desa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan administratif dan objek dari pembangunan pemerintah di atasnya. Desa kini bukan sekadar pemerintahan lokal, melainkan sebagai pemerintahan masyarakat melalui penggabungan fungsi antara komunitas yang mandiri dan pemerintahan lokal. (Fredi Kurniawan, 2020). Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk meningkatkan, memperkuat, dan mengembangkan inisiatif lokal, semangat otonomi, serta kemandiriannya. Selanjutnya, posisi desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, desa diberikan wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari eksistensi desa sebagai entitas pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari tahun 2014 UU Desa sudah memasuki satu dekade pada tahun 2024. Berbagai perubahan telah dirasakan oleh desa mulai dari besarnya kewenangan yang diberikan, sampai pendanaan untuk pembangunan desa yang cukup besar. Kewenangan yang besar berarti kesempatan besar bagi desa untuk mampu membangun dan mengurus tata pemerintahannya sendiri, dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak desa mengungkapkan bahwa UU Desa sangat membantu dan membuka ruang terjadinya perubahan desa ke arah yang lebih baik sehingga tujuan utama pembangunan yaitu kesejahteraan dapat tercapai (Sjaf, 2022).

Melalui UU Desa pasal 80 ayat (1) perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal merupakan jantung kemandirian desa. Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar pijakan bagi eksistensi desa yang bermanfaat untuk warga. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam perencanaan desa adalah alokasi anggaran, yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah desa, bukan juga untuk membangun prasarana fisik desa saja, tetapi alokasi untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan. Besaran dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat mulai 2015 sudah memberikan manfaat yang baik bagi Pemerintah desa dan masyarakat desa. Di antaranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menyejahterakan masyarakat desa.

Misalnya Desa Midang di Lombok Barat dengan mengembangkan dan membesarkan BUMDes Maju Berkah yang bergerak dalam usaha toko sembako dan ritel modern, memiliki omset 200 juta setiap bulanya atau 2,4 miliar setahun. Upaya pemerintah desa Midang dan peran pengurus BUMDes Maju Berkah serta dukungan besar masyarakat menjadi kunci kesuksesan BUMDes. BUMDes Maju Berkah sebagai sentra distribusi 5 kebutuhan masyarakat dan UMKM untuk membantu menjual dan mendistribusikan produk-produk lokal sehingga dapat berkembang pesat dan dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional dan internasional. Hal ini membawa pengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat (Habibullah Aminy, dkk. 2019).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, seperti halnya desa lain di Indonesia, diberi dorongan oleh pemerintah dalam bentuk besaran dana yang didistribusikan kepada masing-masing desa. Pengunaan dana yang besar tersebut diperuntukan untuk mengelola kewenangan serta aset yang dimiliki oleh desa. saat ini gencar ditekankan pada kewenangan desa yaitu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang berguna dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat. Maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa, agar dapat memwujudkan tujuan dan sasaran penggunaan dana yang diterimah khusunya berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tindakan Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan

masyarakat, perubahan prilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat (Dr. Oos M. anwas, 2013).

Kalurahan Wirokerten yang terletak di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul yang Perkembangannya mengalami tantangan dan peluang yang sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan masyarakat apalagi dengan kemajuan zaman yang menuntut adaptasi dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejateraan dan kulitas hidup yang lebih baik. Data hasil pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten menunjukkan bahwa ada 6 sub bidang kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh pihak pemerintah Kalurahan Wirokerten, diantarnya yaitu pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur kalurahan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi usaha micro kecil dan menengah (UMKM), dukungan penanam modal (BUMDes), perdagangan dan perindustrian (kelompok usaha ekonomi produktif). Hanya terdapat tiga sub bidang kegiatan yang dicapai oleh Pemerintahan Kalurahan Wirokerten dan hal tersebut diduga kerena dalam proses pemberdayaan masyarakat masih terdapat beberapa hal yang kurang optimal dimana menurut Terry Wilson (dalam Nyoman S., 2005:130) menjelaskan bahwa ada empat (4) tahap proses pemberdayaan yaitu tahap *awakening, understanding, harnessing dan using* yang apabila keempatnya dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan kesejateraan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang tidak optimal dapat mempengaruhi penyusunan kegiataan pelaksanaan pemerintah kalurahan

kerena ketika masyarakat tidak diberdayakan dengan baik maka, pemerintah kalurahan tidak akan dapat memahami dengan baik apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

Keseluruhan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten menghabiskan dana sebesar Rp 322,837.000 hal ini sangat sedikit bila dibandingkan dari total dana yang terima Kalurahan Wirokerten Rp 5,304,358.288.00 Selain itu, Kalurahan Wirokerten memiliki kekayaan yaitu tanah kas kalurahan, bangunan yang dikelola kalurahan juga lahan pertanian 7 yang cukup, hal ini diketahui dari luas lahan persawahan yang mencapai 147.32 ha, memiliki beragam potensi, seperti desa wisata, pemancingan ikan bawal, obat herbal, serta Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM di Desa Wirokerten tersebar di enam dukuh, yaitu di Kepuh Kulon, Wirokerten, Glondong, Mutilan, Grojogan dan Kepuh Wetan. UMKM tersebut dikelola oleh BUM Desa Wirajaya Makmur yang mengelola beberapa kelompok UMKM, yaitu sentra emping melinjo, pengrajin sepatu rajut, pembuatan paving block, perkebunan hidroponik, dan pemilahan sampah lainnya. sedangkan mayoritas penduduknya bermata pencarian buruh harian lepas juga sebagianya petani Oleh kerna itu seharusnya dengan potensi yang dimiliki kalurahan Wirokerten, pemerintah kalurahan harusnya lebih mampu memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat desa itu sendiri (sumber wawancara pemerintah wirokerten dan data APBKal).

Pemerintah Kalurahan Wirokerten sebagai actor utama dalam Pembangunan memiliki peran yang Sangat penting dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya manusia yang ada. Terkait pemanfaatan dana yang diterimah dari 75 kalurahan di Kabupaten Bantul sangat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai dari penyerapan tenaga kerja melalui program-program Kalurahan. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi di Kalurahan Wirokerten, meskipun UMKM telah terbesar di hampir seluruh dukuh di Kalurahan Wirokerten, namun Kalurahan Wirokerten tergolong desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Kapanewon Banguntapan berdasarkan jumlah penduduk. Apabila memperhatikan anggaran penerimaan Kalurahan Wirokerten, maka diketahui bahwa anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Wirokerten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2023 besaran anggaran pendapatan mencapai Rp 4,865,866,100.00 sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 5,304,358.288.00 pada tahun 2024. Besarnya dana yang diterima, masih kurang mendapat perhatian dengan masih sedikitnya dana yang diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Kalurahan Wirokerten (Sumber APBKal 2023-2024 Wirokerten).

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti di atas, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Pemerintah kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan

masyarakat sebagai pelaku atau subyek dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh kerena itu, peneliti menggunakan pendekatan *konsep Governing*. *Governing* adalah sebuah konsep yang berbeda dengan konsep *ruling*. Stephen A Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Rulling But Not Governing* menunjukkan perbandingan antara memerintah (*governing*) serta menguasai (*rulling*). Gagasan ini timbul berangkat dari sejarah pertumbuhan militer serta politik di Mesir yang mana militer mendominasi dinamika politik serta lini kehidupan warga. Namun, kekuatan militer ini tidak menjadi pemerintah sebab ia tidak mempunyai kewenangan mengatur serta mengurus. Dalam konteks ini, dominasi kekuatan militer hanya berhenti pada tataran menguasai (*rulling*). Dalam artian bahwa *rulling* serta *governing* mempunyai makna yang berbeda. Dimana *rulling* bisa dimaknai sebagai siapapun bisa menguasai serta memiliki faktor dominasi. Sedangkan *governing* lebih melekat pada pemerintah yang terlegitimasi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Governing yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus mempunyai proses, fungsi, serta hasil. *Governing* memiliki proses politik, hukum, serta administrasi. Dalam pembentukan hukum serta kebijakan merupakan perbuatan penting pemerintah dalam governing. Gagasan ideal dalam konteks ini ialah fungsi ekstraksi, distribusi, perlindungan, serta koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, masyarakat serta warga. berbicara soal *governing* tidak terlepas juga dari kebijakan, sebab kebijakan lahir dari pada proses governing itu sendiri. Sehingga kebijakan berarti tindakan utama pemerintah, fungsi pemerintahan merupakan (*protecting*)

ataupun melindungi bukan hanya semata-mata (*promoting*). perspektif *governing* dalam penelitian ini mengarah pada fungsi pemerintah dan kebijakannya bekerja dalam pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengatur serta mengurus. Dengan demikian hal ini selaras dengan kewenangan desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Dimana pemerintah desa mempunyai kewenangan yang penuh untuk mengurus serta mengatur pemerintahannya secara mandiri demi kemandirian desa serta kepentingan masyarakat desa. Kewenangan desa merupakan hak desa guna mengatur; mengurus; serta bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan mengatur serta mengurus tersebut diperuntukan kepada urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, adalah: pengaturan (*public regulation*), pelayanan public (*public goods*) serta pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). sehingga diperlukan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis serta tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya namun lebih tegak lurus serta responsible mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (*protecting*) dan pendistribusian (*distributing*) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sutoro Eko, 2021: 12- 14).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengungkapkan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di

Kalurahan Wirokerten, Kepanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan perspektif *Governing*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Wirokerten, Kepanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Wirokerten, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Wirokerten.
2. Untuk menganalisis peran Pemerintah Kalurahan Wirokerten dalam proses pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten.

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan desa hususnya tentang inovasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini sebagai salah satu bahan referensi masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola dan pemanfaatan dana desa.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan batasan peneliti yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar sesuai dengan yang menjadi fokus di dalam pelaksanaan penelitian ini, agar data dan informasi yang diambil susuai dengan yang menjadi kebutuhan. Maka dari itu, pembahasan terkait Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Wirokerten tidak melebar dan menjadi terfokus, maka perlu adanya fokus penelitian guna membatasi uraian-uraian masalah dalam penelitian ini.

Fokus penelitian serta analisis terhadap hasil wawancara ini kemudian akan dilakukan berdasarkan tahapan proses pemberdayaan masyarakat menurut teori Terry Wilson, yang meliputi: *awakening* (membangkitkan kesadaran), *understanding* (memahami potensi), *harnessing* (memanfaatkan potensi), dan *using* (menggunakan potensi secara berkelanjutan).

Berikut merupakan fokus penelitian yang dirancang oleh peneliti untuk menghasilkan satu pemahaman baru berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Membangkitkan kesadaran masyarakat akan peran dan potensi diri (*awakening*) di Wirokerten
2. Meningkatkan pemahaman kolektif tentang proses dan tantangan pemberdayaan (*understanding*) di Wirokerten
3. Menggali dan mengelola potensi lokal sebagai sumber kekuatan masyarakat (*harnessing*) di Wirokerten
4. Menerapkan hasil pemberdayaan dalam kehidupan bermasyarakat (*using*) di Wirokerten

E. Literatur Review

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Rahmatullah *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47.1 (2021): 24-33. Dengan Judul Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dalam Penelitian ini, penulis Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah menjelaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa implementasi

pengelolaan dana desa di Desa Teluk Majelis sudah sesuai dengan konsep *Good Governance*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (a) Penerapan Prinsip *Good Governance*: Pengelolaan dana desa di Desa Teluk Majelis telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa, serta upaya pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada public. (b) Transparansi dan Partisipasi: Pemerintah Desa Teluk Majelis melakukan pemasangan papan informasi publik dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) untuk meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. (c) Sinergitas dalam Pengawasan: Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif dalam pengawasan dan sinergitas dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik pendapat dalam pelaksanaan pembangunan. Konsultasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang baik di Desa Teluk Majelis dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang melibatkan masyarakat secara aktif dan transparan. Rahmatullah, Ahmad Fajar, and Ahmad Farhan

Rahmatullah. "Good governance dalam pengelolaan dana desa teluk majelis kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63-67. berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa." Penelitian ini mengeksplorasi peran penting desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengelola dana sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya. penelitian ini menggali kebijakan pemerintah daerah mengenai alokasi dana desa dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini. Penelitian ini menyoroti aktivitas manajemen komprehensif yang terlibat, termasuk perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas, semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan dengan baik secara normatif dan administratif, tetapi belum mencerminkan pemberdayaan masyarakat secara substansi. Dominasi kepala desa dan budaya paternalistik menghambat partisipasi aktif

warga. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang lebih baik dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan dana desa yang efektif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani, Rininta. "Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Administrasi Negara* 28.1 (2022): 1-23. Dalam Penelitian ini menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan Dana Desa, dengan fokus pada dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dilakukan selama 3 bulan di Desa Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, pada tahun 2021. Metode ini dipilih karena adanya kecenderungan proses Collaborative Governance yang bersifat subjektif dan personal, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori Collaborative Governance dalam pengelolaan Dana Desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lipulalongo melibatkan elemen kunci yaitu; (a) Dialog Tatap Muka: Dialog yang baik membangun kepercayaan antar aktor, menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. (b) Membangun Kepercayaan: Kepercayaan antar aktor penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menciptakan lingkungan kolaboratif. (c) Komitmen terhadap Proses: Komitmen semua pihak untuk melaksanakan keputusan musyawarah sangat

penting untuk keberhasilan pengelolaan dana. (d) Pemahaman Bersama: Penyetaraan pemahaman antara perangkat desa dan masyarakat diperlukan untuk menghindari kekhawatiran dan saling mencurigai. (e) Hasil Antara: Kolaborasi yang baik diharapkan menghasilkan penggunaan anggaran desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di masyarakat desa.

4. Penelitian yang dilakukan Nugroho, Hanantyo Sri, and Agustina Rahmawati. "Analisis Inovasi Pengembangan Organisasi Pada Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8.2 (2020): 129-144. Hasil penelitian adalah elemen dan strategi berupa faktor individu aparatur pemerintah desa, penggunaan teknologi, partisipasi, dan berbagi pengetahuan pada implementasi inovasi kebijakan dapat mendukung proses pengembangan organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari. Adapun, beberapa inovasi kebijakan tersebut, yakni inovasi sistem administrasi pemerintahan berupa 1) Sistem Data Administrasi Kependudukan (Sidampak), 2) inovasi sistem pelayanan masyarakat berupa sistem Lukadesi, Ulang tahunku dan Sidanik, 3) inovasi ekonomi dan wisata berupa program konservasi burung hantu Tyto

Alba, 4) inovasi bidang pendidikan berupa program sekolah pintar dan Tim Pemerhati Anak (Tim Penak).

5. Penelitian dari Shuha, Khalida. "Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman)." *Jurnal Akuntansi* 6.2 (2018). Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai pengelolaan dana desa, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memahami pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung. Hasil penelitian: (a) Perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan tersebut. (b) Terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan dana desa, yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai, keterlambatan dalam pelaporan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta pemahaman masyarakat yang masih rendah. (c) upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dilakukan beberapa upaya, seperti pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, peningkatan tingkat pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat dan perangkat desa.

6. Penelitian dari Handayani Jaka Saputra (2019) judul Model Tata Kelola Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Dlingo, Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini menjelaskan sebaiknya tatakelola dana desa untuk menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui strategi tata kelola dana desa di Desa Dlingo, yang merupakan salah satu desa percontohan di Indonesia yang sukses dalam peningkatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat desa. Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan terlebih dahulu melakukan analisis data dokumen dan kemudian menyusun hasil untuk menerangkannya secara lebih terperinci dengan wawancara dan observasi langsung ke desa. Dari hasil yang ditemukan yaitu *pertama*, pemerintah desa dlingo melakukan tata kelola sesuai dengan landasan hukum dana desa, keberhasilan pengembangan Desa akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah dan segenap komponen (*stakeholders*) yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dalam kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah. *Kedua*, pengelolaan dana desa, yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini membuktikan Pemerintah Desa Dlingo sudah mengimplementasikan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 71-75 semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifitas pengendalian intern sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas. *Ketiga*, strategi kepemimpinan kepala Desa dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam pembangunan dilakukan dengan sangat baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, Pembangunan desa di Desa Dlingo menentukan strategi wilayah Pembangunan infrastruktur, bahwa pembangunan fisik desa bukan hanya untuk percepatan pembangunan, tetapi ada aspek lain yang lebih penting yaitu pembangunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi jika pembangunan tanpa adanya strategi tata ruang dan tata wilayah.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu komponen proses pembangunan, pemberdayaan merupakan sarana untuk menggali potensi masyarakat agar dapat dikembangkan atau diolah lebih lanjut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan tidak hanya mencakup peningkatan produksi ekonomi masyarakat, tetapi juga perubahan perilaku, mental, dan mentalitas yang positif. Mas'oed Mardikanto (2017) menyatakan bahwa Salah satu pengertian pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk memberikan kekuatan atau daya kepada masyarakat. Sumodiningrat dalam Totok Mardikanto (2017: 26) mengartikan

pemberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang menjadi bagian dari masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat sepenuhnya mewujudkan jati diri, harkat, dan kemampuannya untuk bertahan hidup dan tumbuh sendiri dalam bidang sosial, agama, budaya, dan ekonomi (Widjaja, 2003).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penyiapan masyarakat dan tindakan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan dalam tatanan keadilan sosial jangka panjang. Untuk mendukung tumbuhnya potensi masyarakat melalui perluasan peran, produktivitas, dan efisiensi, pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada upaya peningkatan produksi yang diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Sumaryadi, 2005:11).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejateraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat, di sisi lain, merupakan suatu proses perubahan struktural yang perlu terjadi dalam masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Mulyono (2008). Oleh karena itu,

pemberdayaan masyarakat mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, seperti dalam pembangunan ekonomi, di mana pemerintah melibatkan masyarakat untuk menggunakan potensi yang dimilikinya guna meningkatkan perekonomian. Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kekuatan atau daya kepada masyarakat agar mereka dapat mengatasi hambatan apa pun yang mungkin mereka hadapi.

Mardikanto 2013 pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan pemberdayaan dalam arti kemampuan atau keunggulan dalam bersaing, kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat (Anwas 2013,h.3).

Dalam pemeberdayaan masyarakat yang di sampaikan oleh Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007, h.2-5) membagi tiga tahap proses pemberdayaan yakni: **Pertama, tahap Penyadaran**, adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberi pencerahan, dengan memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi, mereka harus memberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan. **Kedua, tahap Pengkpasitasan**, tahap ini terdiri dari tiga jenis

pengkapasitasan yakni pengkapasitasan manusia, organisasi dan nilai. *Pengkapasitasan manusia* yang dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan yang lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok masyarakat. *Pengkapasitasan organisasi* dilakukan dengan cara restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. *Pengkapasitasan sistem nilai* yang dilakukan dengan cara membuat aturan, didalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. **Ketiga, tahap penyadaran**, tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan yang lebih baik.

Sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat yang menyangkut dua kelompok yang saling terkait antara masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan satu pihak mearuh kepedulian untuk memberdayaakan (pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) pedulih terhadap segalah kebutuhan dan perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa aspek yang harus diperhatikan menurut Ndara (Nyoman S, 2005:146) sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan Politik, bertujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah. Melalui posisi tawar ini,

masyarakat bisa memperoleh hak-haknya dalam bentuk barang, layanan, dan perhatian tanpa merugikan pihak lain.

- b) Pemberdayaan Ekonomi, dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai konsumen agar dapat menghadapi dampak negatif dari pertumbuhan, menanggung risiko kesalahan pengelolaan, memikul beban pembangunan, serta menghindari dijadikan kambing hitam atas kegagalan program dan kerusakan lingkungan.
- c) Pemberdayaan Sosial Budaya, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui investasi dalam manusia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia, penggunaan sumber daya manusia secara optimal, serta perlakuan yang adil terhadap semua individu.
- d) Pemberdayaan Lingkungan, dimaksudkan sebagai program untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar ada hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pemberdayaan memiliki beberapa indikator yang perlu diperhatikan guna memastikan kelangsungan proses pemberdayaan yang dilakukan tersebut. Menurut Wilson dalam Nyoman Sumaryadi (2005:122-128), ada beberapa indikator yang mempengaruhi hasil dari pemberdayaan dalam suatu organisasi. **Pertama**, Reputasi, yaitu tingkat penilaian organisasi yang bisa digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemberdayaan.

Kedua, Fokus Manajemen, yaitu upaya manajemen untuk menciptakan kesuksesan dalam pemberdayaan. **Ketiga**, Manajemen Pemberdayaan, yang merujuk pada pemahaman dan pengelolaan pemberdayaan oleh para pemimpin atau birokrat. **Keempat**, Atmosfer, yaitu suasana dalam proses pemberdayaan yang menunjukkan adanya komitmen dan semangat. **Kelima**, Kepemimpinan, yang mencakup gaya kepemimpinan seorang manajer atau birokrat dalam mendorong bawahannya untuk mencapai tujuan pemberdayaan. **Keenam**, Mengeluarkan kesanggupan manusia, yaitu usaha yang dilakukan untuk mendorong individu agar menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dalam pemberdayaan. **Ketujuh**, Pengakuan dan penghargaan, yang berkaitan dengan penilaian berupa dukungan dan penghargaan terhadap pemberdayaan yang dilakukan. **Kedelapan**, Inovasi, mencakup hal-hal baru dalam pemberdayaan yang memudahkan tercapainya tujuan. **Kesembilan**, Kepercayaan, yaitu keyakinan dan keterbukaan individu dalam mengambil risiko dalam pemberdayaan. **Kesepuluh**, Teamwork, yaitu kerjasama antara individu-individu untuk mencapai kesuksesan dalam pemberdayaan. **Kesebelas**, Pengambilan dan pengendalian keputusan, yang melibatkan sikap pemimpin dan yang dipimpin dalam membuat keputusan dan mengendalikan pemberdayaan. **Keduabelas**, Komunikasi, yaitu keterbukaan antar individu dalam menyampaikan informasi. **Ketigabelas**, Masyarakat, mencakup penerimaan, kepuasan, dan partisipasi dalam pemberdayaan. **Keempatbelas**, Struktur dan Prosedur, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai

keberhasilan dalam pemberdayaan. Dan **Kelimabelas**, Tujuan Organisasi, yang mencakup sumbangsih pemberdayaan dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terdapat empat (4) tahapan Pemberdayaan yang dijelaskan oleh Terry Wilson dalam tulisan Nyoman Sumaryadi (2005:131) sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pemberdayaan *awakening*, yaitu tahapan dimana pemberdayaan bertujuan mendorong individu untuk menerima tantangan, yang biasanya dilakukan dengan adanya pendampingan.
- 2) Tahapan Pemberdayaan *understanding*, dimana individu mulai memahami dan memiliki persepsi baru terhadap diri mereka, pekerjaan, harapan, dan kondisi umum, sehingga mereka tahu apa yang sedang dilakukan.
- 3) Tahapan Pemberdayaan *harnessing*, adalah tahap di mana individu menentukan bagaimana cara memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki dalam konteks pemberdayaan.
- 4) Tahapan Pemberdayaan *using*, yaitu penerapan keterampilan dan kemampuan yang ada dalam pemberdayaan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi konsep pemberdayaan dari Terry Wilson, yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dalam konteks fungsi

mengatur dan mengurus di Kalurahan Wirokerten dengan fokus pada tahapan pemberdayaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara fisik, emosional, finansial, dan sosial budaya. Sementara itu, tujuan utama pemberdayaan masyarakat, menurut Sumaryadi (2005:25), adalah untuk mendukung pembangunan yang sejati dan menyeluruh bagi kelompok-kelompok terpinggirkan, miskin, rentan, dan minoritas dalam masyarakat. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan masyarakat tersebut lebih banyak kekuatan sosial ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mendasar mereka dan menjadi lebih mandiri sekaligus memajukan masyarakat. Oleh karena itu, proses harus selalu didahulukan daripada hasil dalam strategi pembangunan. Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang menghargai dan memanusiakan orang-orang dalam masyarakat lebih mungkin terjadi ketika taktik yang berorientasi pada proses diprioritaskan. Menurut sudut pandang ini, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus didefinisikan oleh partisipasi daripada hanya mobilisasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan program: Masyarakat bukan hanya konsumen; mereka adalah pelaku penting yang secara aktif berkontribusi terhadap terciptanya program. Intinya, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap,

dan kemampuan pribadi. Dengan demikian, setiap orang akan mampu berjuang dan bekerja sendiri untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Adisasmita (2006) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat melibatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien, yang dapat dianalisis dari tiga aspek berbeda: *Pertama* masukan, meliputi sumber daya manusia, pendanaan, peralatan, data, perencanaan, dan teknologi; *Kedua* proses, seperti pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan; dan *Ketiga* keluaran, dengan fokus pada pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, Penggunaan dana desa diutamakan untuk mendanai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya sehingga desa mampu berdiri sendiri, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Dalam buku “Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi” diungkapkan bahwa pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha, rencana yang sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik secara individu maupun kelompok, guna untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada dalam diri individu maupun kelompok (Pranarka, 1996). Oleh kerena itu, dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan upaya berkesinambungan yang tarsus menerus

yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mengembangkan daya (potensi) dan sumber daya (pusat kekuatan). Sehingga adanya transformasi dari tidak mempunyai daya menjadi berdaya, dan dari berdaya lemah bertambah menjadi berdaya kuat dan terus akan menjadi budidaya.

2. Pemerintah

Pemerintah merupakan institusi formal yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kehidupan bermasyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Max Weber, pemerintah adalah satu-satunya entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuasaan fisik yang sah. Keberadaan pemerintah tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga simbolis sebagai representasi dari kedaulatan dan kekuasaan negara. Pemerintah menyusun dan menegakkan hukum, mengatur kehidupan sosial, serta menjaga ketertiban umum demi terciptanya stabilitas politik dan sosial.

Fungsi utama pemerintah meliputi regulasi, pelayanan publik, dan redistribusi kekayaan. Pemerintah bertugas menetapkan hukum dan kebijakan (fungsi regulatif), menyediakan layanan seperti pendidikan dan kesehatan (fungsi pelayanan), serta mendistribusikan kembali sumber daya melalui sistem pajak dan subsidi (fungsi redistributif). Harold Laski dan John Locke menekankan bahwa pemerintah dibentuk untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara, sekaligus memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Secara politik, pemerintah merupakan perwujudan konkret dari kekuasaan negara. Dalam pendekatan institusional, pemerintah dipahami sebagai organisasi yang menjalankan kewenangan negara secara sistematis dan terstruktur. Pemerintah umumnya terdiri dari tiga cabang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bekerja dalam sistem checks and balances untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan oleh satu pihak. Setiap cabang memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Bentuk dan tipe pemerintahan beragam di berbagai negara. Pemerintahan dapat berbentuk monarki, republik, demokrasi, ataupun otokrasi. Selain itu, sistem pemerintahan dibedakan menjadi presidensial dan parlementer. Dalam sistem presidensial, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Pemilihan bentuk dan sistem pemerintahan berimplikasi pada pola distribusi kekuasaan dan mekanisme pengambilan keputusan.

Legitimasi merupakan landasan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tanpa legitimasi, pemerintah akan kehilangan kepercayaan rakyat dan cenderung menghadapi resistensi sosial. Menurut Max Weber, legitimasi dapat bersumber dari tiga tipe: tradisional (berbasis adat), karismatik (berbasis kepribadian pemimpin), dan legal-rasional (berbasis hukum). Pemerintahan modern umumnya memperoleh legitimasi dari sumber legal-rasional yang ditopang oleh konstitusi, pemilu, dan sistem hukum yang sah.

Hubungan antara pemerintah dan warga negara bersifat timbal balik dan saling mengikat. Dalam teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, pemerintah lahir dari kesepakatan bersama warga negara untuk menyerahkan sebagian hak individu demi perlindungan dan ketertiban sosial. Sebagai imbalannya, pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negara, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Dalam perspektif ekonomi politik, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan ekonomi. Teori Keynesian menekankan perlunya intervensi aktif pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi krisis dan menciptakan stabilitas makroekonomi. Sebaliknya, pandangan neoliberal mengusulkan minimalisasi peran pemerintah dan lebih menyerahkan mekanisme pasar untuk mengatur perekonomian. Perdebatan antara dua kutub pemikiran ini membentuk berbagai kebijakan ekonomi di dunia kontemporer.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* menjadi acuan normatif bagi kualitas kinerja pemerintah. Menurut UNDP, prinsip-prinsip *good governance* mencakup partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah yang mampu menjalankan prinsip-prinsip ini akan lebih dipercaya publik dan mampu menjawab tantangan sosial secara inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks negara demokratis.

Namun, pemerintah di era kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari korupsi, ketimpangan sosial, disinformasi digital, hingga perubahan iklim. Pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berinovasi dalam penyusunan kebijakan publik yang adaptif dan solutif. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam menjawab permasalahan yang sifatnya lintas sektor dan lintas batas negara.

Menghadapi masa depan, pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi digital melalui *e-government* dan tata kelola berbasis data. Teknologi informasi tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga membuka ruang partisipasi warga secara lebih luas dan transparan. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menjadi lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman, sehingga mampu mempertahankan legitimasi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsinya di tengah dinamika global.

3. Pemerintah Desa

Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang didukung oleh perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai-nilai kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,

kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Suryaningrat, pemerintah desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintahan terendah yaitu camat. Sebagai penyelenggara masyarakat, pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pembangunan masyarakat, pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum, seperti penegakan hukum, ketenteraman, dan ketertiban (Kansil, 1991).

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan dalam masyarakat desa, menyampaikan rancangan peraturan desa dan menetapkannya menjadi peraturan desa bersama BPD dan memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, menyelenggarakan kehidupan demokrasi, melaksanakan atas pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintah desa, menaati dan menegakkan segala peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik, membina, melindungi, dan

melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta memberitahukan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam rangka mendayagunakan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, sesuai dengan buku Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Kessa, 2015).

Pemerintah desa mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Kader pemberdayaan masyarakat desa, tenaga pendamping profesional, dan/atau pihak luar dapat membantu kepala desa dalam mengoordinasikan pembangunan desa. Pendampingan di wilayahnya dikoordinasikan oleh camat atau sebutan lain. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk dalam kategori pembangunan desa.

Pemerintah desa merupakan lembaga formal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kehidupan bermasyarakat untuk kepentingan masyarakat desa. Kesimpulan ini didasarkan pada berbagai pendapat yang telah disebutkan di atas.

4. *Governing*

Mazhab Timoho mendefinisikan pemerintahan sebagai kemampuan pemerintah untuk memerintah. Konsep memerintah dan memerintah tidaklah sama. *"Rulling but not Governing"* ditulis oleh Stevan A. Cook pada tahun 2007. Kekuasaan dapat mendominasi semua lini atau wilayah, tetapi tidak dapat memerintah, menurut literatur tentang dominasi militer dalam politik. Di sini, "memerintah" diartikan sebagai negara yang bukan pemerintah dalam arti tidak mengatur atau mengelola.

Konsep pemerintahan yang dipahami sebagai upaya mengatur dan mengelola harus memiliki proses, fungsi, dan hasil. Pemerintahan mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan undang-undang dan kebijakan merupakan tindakan penting pemerintah dalam pemerintahan. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, perlindungan, dan koreksi yang dilakukan pemerintah terhadap negara, warga negara, dan masyarakat. Penggunaan perspektif pemerintahan dalam penelitian ini mengarah pada inovasi dalam pemerintahan desa dan kebijakan pemerintah dalam mengelola dana desa.

Menurut Dwiyanto, "pemerintahan merupakan penjumlahan semua lembaga dan unsur-unsur dalam masyarakat, baik yang bersifat pemerintahan maupun nonpemerintahan, yang dimaknai sebagai mengambil peran yang lebih besar mulai dari proses, aturan-aturan, dan kelembagaan yang memungkinkan

terjadinya pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah secara kolektif dalam masyarakat.”

Arjen Boin (2020) *governing* merupakan pengaturan tata kelola tingkat sistem dapat dikategorikan secara luas. Cara pemimpin publik dan pegawainya menghadapi tantangan yang memungkinkan mereka memantau, memahami, menganalisis, dan merencanakan wilayahnya untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan kualitas hidup warganya secara nyata. Alistair Cole (2008) Governing memerintah adalah masalah mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, memproduksi barang publik, mengoordinasikan perilaku pribadi, mengatur pasar, menyelenggarakan pemilihan, mendistribusikan sumber daya, menentukan pengeluaran. Pemerintahan adalah bisnis inti pemerintah, yang mengklaim berbicara dengan suara otoritatif dan untuk mewujudkan legitimasi superior terhadap kepentingan atau kekuatan lain dalam masyarakat. Le Galès (2002:17) pemerintah mengacu pada struktur, aktor, proses dan output', sementara pemerintahan berkaitan dengan semua lembaga, jaringan, arahan, peraturan, norma, penggunaan politik dan sosial, aktor publik dan swasta yang berkontribusi pada stabilitas masyarakat.

Uraian di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pemerintahan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah yang memiliki kekuasaan dan legitimasi untuk membentuk pemerintahan. Dalam bentuknya yang paling mendasar, pemerintahan adalah pelaksanaan kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah. Pemerintah terlibat dalam dua kategori tindakan atau perbuatan dalam rangka operasinya untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan

rakyat: tindakan biasa atau asli (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Sementara tindakan hukum pada hakikatnya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu atau menciptakan hak dan kewajiban, tindakan nyata adalah tindakan pemerintah yang tidak relevan dengan hukum dan tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan peneliti dalam memilih pendekatan ini adalah menghasilkan temuan penelitian yang akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, selain menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas tinggi. Penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian faktual tentang keadaan terkini sekelompok orang, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau peristiwa, merupakan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau memberikan jawaban mengenai status terkini subjek penelitian (Purba, 2021).

Penelitian deskriptif didefinisikan oleh Rukajat (2018) sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, aktual, dan terkini karena melibatkan penciptaan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan fakta-fakta mengenai pemberdayaan masyarakat oleh

pemerintah Desa di kalurahan Wirokerten yang melibatkan penggunaan uang lokal.

2. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Fokus penelitian adalah Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberdayakan masyarakat.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu yang berperan sebagai informan dan memberikan data atau informasi kepada peneliti. Seluruh entitas yang meliputi atau berhubungan dengan objek penelitian, baik orang, barang, maupun organisasi terkait, menjadi fokus penelitian. Oleh karena peneliti harus mengidentifikasi informan untuk memperoleh dan mengamati data mengenai masalah yang diteliti, maka subjek penelitian memegang peranan yang sangat penting. Analisis purposif merupakan metode yang digunakan untuk memilih subjek penelitian. Sumber data diidentifikasi melalui proses pemilihan yang disengaja dengan mempertimbangkan tujuan dan perhatian tertentu. Pengambilan sampel purposif merupakan metode pemilihan sumber data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Sugiyono, 2012: 218). Menetapkan parameter untuk subjek penelitian merupakan langkah awal dalam penelitian kualitatif.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, sehingga dianggap memahami masalah secara

mendalam dan dapat dipercaya. Pihak-pihak yang terkait antara lain dibawa ini:

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	L/P	Umur	Jabatan
1	Rakhmawati Wijayaningrum, SE	P	47	Lurah
2	Widiyanta, SE	L	40	Kasih Kesejahteraan
3	Nur Sahit	L	44	Ketua RT 03
4	Ismiyarsih	p	48	Ketua PKK
5	Fauzi Dwi Kurniawan	L	29	Karang Taruna
6	Wawan	L	34	PLD
7	Siti Rohma	P	44	Masyarakat
8	Sutrisno	L	51	Tokoh Masyarakat
9	Sukardi	L	50	Tokoh Masyarakat
10	Wahyu	L	39	Kasi Perencanaan

Sumber: Data Primer 2025

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu penelitian sekaligus memperoleh data yang diperlukan. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan untuk penelitian ini benar-benar valid, peneliti menggunakan sejumlah teknik pelengkap. Temuan penelitian sangat dipengaruhi oleh keakuratan pemilihan dan penyusunan metode pengumpulan data serta instrumen. Di antara metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Observasi

Untuk mengumpulkan data dan gambaran yang sebenarnya sesuai dengan tujuan penelitian, observasi adalah pengamatan dan pencatatan gejala yang akan diteliti secara metodis. Observasi direncanakan dan dicatat

secara metodis dan dapat diatur keterbatasannya (reliabilitas) dan validitasnya. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek untuk mempelajari keberadaan, keadaan, konteks, dan signifikansinya pada saat pengumpulan data (Satori dan Komaria, 2012:105).

Dengan menggunakan metode ini, peneliti berupaya mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati semua interaksi dan aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian dan yang berkaitan atau menggambarkan pokok bahasan penelitian. Peneliti melakukan lima kali pengamatan selama proses pengamatan: pengamatan pertama dilakukan pada bulan November 2022 saat proses pengajuan penelitian di Desa Wirokerten; pengamatan kedua dan ketiga dilakukan pada bulan Februari dan Mei 2023 saat peneliti mewawancarai pihak pemerintah Desa Wirokerten, meliputi Ibu Rini, Kepala Desa; Bapak Widayanto, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial; dan pengamatan keempat dan kelima dilakukan pada bulan Juni dan Agustus 2024 saat melakukan pengumpulan data peraturan desa untuk Bapak Wahyu, Kepala Bidang Perencanaan Desa.

Dalam proses observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Kalurahan Wirokerten, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses terhadap informasi dan dokumen program pemberdayaan masyarakat. Tidak semua data dapat diakses secara terbuka karena sebagian bersifat internal dan memerlukan izin resmi dari pihak pemerintah desa. Selain itu, beberapa kegiatan pemberdayaan yang hendak diamati mengalami perubahan jadwal atau bahkan penundaan,

sehingga menyulitkan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung pada waktu yang direncanakan. Tingkat partisipasi masyarakat juga cenderung fluktuatif, tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, sehingga menyulitkan peneliti mendapatkan gambaran utuh mengenai efektivitas pelaksanaan program. Keterbatasan waktu dan mobilitas peneliti turut menjadi tantangan, mengingat kegiatan pemberdayaan tersebar di beberapa wilayah dusun. Di sisi lain, dokumentasi kegiatan oleh pihak kalurahan masih belum dilakukan secara sistematis dan lengkap, sehingga menyulitkan penelusuran terhadap keberlanjutan dan dampak dari program yang telah berjalan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Wirokerten menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang cukup beragam, meliputi pelatihan UMKM, penyuluhan pertanian, pelatihan keterampilan bagi perempuan, serta penguatan kapasitas organisasi masyarakat seperti karang taruna dan PKK. Pemerintah kalurahan memainkan peran aktif dalam merancang, mengoordinasikan, dan memfasilitasi program-program tersebut, dengan keterlibatan langsung dari kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Partisipasi masyarakat cenderung tinggi pada program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan. Selain itu, Kalurahan Wirokerten juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan instansi

pemerintah, untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Meski demikian, masih ditemukan adanya kesenjangan dalam akses partisipasi, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan.

b. Wawancara

Percakapan dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua orang pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara menjawabnya-disebut wawancara.

Dengan mengajukan pertanyaan langsung dan menerima jawaban langsung dari informan di lokasi penelitian, peneliti berupaya mengumpulkan data atau informasi tentang objek yang diteliti.

Selain itu, saat mewawancarai informan, peneliti mengikuti standar wawancara yang dibuat berdasarkan ruang lingkup penelitian. Pertanyaan langsung diajukan kepada partisipan untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini.

Berikut merupakan urutan dalam proses wawancara bersama informan. Rakhmawati Wijayaningrum, SE (Lurah) wawancara pertama dilakukan dengan Lurah Kalurahan Wirokerten untuk memperoleh gambaran umum mengenai kebijakan dan arah strategis pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Widiyanta, SE (Kasi Kesejahteraan) Dilanjutkan dengan wawancara kepada Kasi Kesejahteraan sebagai pelaksana teknis kegiatan yang berkaitan langsung dengan program-

program sosial dan pemberdayaan. Wahyu (Kasi Perencanaan) Peneliti mewawancara Kasi Perencanaan untuk memahami bagaimana perencanaan program pemberdayaan disusun, termasuk peran musyawarah desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Wawan (Pendamping Lokal Desa/PLD) PLD diwawancara untuk mendapatkan perspektif eksternal tentang pelaksanaan pemberdayaan, monitoring, serta evaluasi program dari sisi pendampingan pemerintah pusat. Ismiyarsih (Ketua PKK) Wawancara dengan Ketua PKK dilakukan untuk mendalami keterlibatan perempuan dan kegiatan pemberdayaan yang menyasar kelompok ibu rumah tangga. Fauzi Dwi Kurniawan (Karang Taruna) Karang Taruna sebagai representasi pemuda memberikan informasi terkait program pemberdayaan yang melibatkan generasi muda, termasuk pelatihan, kewirausahaan, dan kegiatan sosial. Nur Sahit (Ketua RT 03) Ketua RT diwawancara untuk menggali informasi mengenai keterlibatan masyarakat di tingkat dusun, termasuk koordinasi dan distribusi informasi dari desa ke warga. Sutrisno dan Sukardi (Tokoh Masyarakat) Dua tokoh masyarakat ini memberikan perspektif lokal mengenai penerimaan, efektivitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan berdasarkan pengalaman mereka di masyarakat. Siti Rohma (Warga Masyarakat) Sebagai informan masyarakat umum, wawancara dengan Siti Rohma bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menerima manfaat dari program pemberdayaan serta kendala yang mereka hadapi dalam partisipasi.

Dalam pelaksanaan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data, peneliti menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menjadwalkan waktu wawancara dengan narasumber, terutama dari unsur pemerintah kalurahan yang memiliki agenda padat dan tidak selalu tersedia sesuai waktu yang diharapkan. Beberapa narasumber juga menunjukkan keraguan dan kehati-hatian dalam memberikan informasi, terutama ketika menyangkut evaluasi program atau kelemahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap dampak dari penyampaian informasi yang bersifat kritis. Kendala-kendala tersebut memengaruhi kelancaran proses penggalian data dan membutuhkan fleksibilitas serta strategi komunikasi yang adaptif dari peneliti.

c. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah dokumentasi, yang dapat ditemukan dalam bentuk buku, dokumen, catatan terkait penelitian, jurnal, atau laporan. Sedangkan menurut Satori dan Komaria (2010:149), dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk masalah penelitian secara saksama guna memperkuat keyakinan dan memberikan bukti atas suatu kejadian.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data di lapangan yang dapat dijabarkan secara mendalam dengan cara melihat, mendokumentasikan, dan mengambil gambar. Selain itu, dokumentasi dapat digunakan untuk pengujian, interpretasi, dan bahkan prediksi,

sehingga dokumentasi telah lama menjadi sumber data untuk penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Dua sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi lapangan dan hasil wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen RPJMKal, RKPKal, APBKal, profil Desa Wirokerten, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kalurahan Wirokerten.

4. Keabsahan Data

Proses triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk tujuan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data, merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa yang diukur benar-benar merupakan variabel yang akan diukur. Intinya, triangulasi adalah strategi multimetode yang digunakan oleh akademisi untuk mengumpulkan dan memeriksa data. Penulis kemudian menggunakan prosedur triangulasi data/sumber untuk memastikan keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif.

Membandingkan metode untuk memeriksa ulang tingkat keandalan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada, membandingkan pernyataan publik dengan pernyataan individu, atau membandingkan hasil observasi dengan wawancara, dikenal sebagai triangulasi data/sumber.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data berdasarkan model analisis intraktif. Kemudian Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2019:321) mengatakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Maka aktivitas dalam analisis data yaitu, *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data

Penyederhanaan, pengabstraksian, dan pengubahan data dari catatan tertulis di lapangan merupakan tujuan utama metode ini. Dengan demikian, data yang berkurang akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data saat dibutuhkan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatannya.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dimulai sejak awal masuk lapangan hingga akhir proses analisis data, yaitu sekitar bulan Februari hingga Maret 2025. Reduksi data dilakukan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data, sebagai bagian dari proses analisis kualitatif yang bersifat berkelanjutan.

Proses reduksi data dilakukan dengan cara menyortir, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari wawancara dengan informan, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu bentuk, proses, dan hasil pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah

Kalurahan Wirokerten - dipertahankan, sementara informasi yang tidak relevan atau berulang disisihkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam proses penelitian ini merupakan hasil reduksi dan disajikan dalam bentuk laporan metodis yang mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun dalam kaitannya dengan unsur-unsur komponennya.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data direduksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyusun informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Data disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif, yang menggambarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam sesuai dengan tema-tema utama penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Apa yang diambil dalam proses penelitian ini akan ditangani secara longgar dan dibiarkan terbuka hingga kesimpulan yang awalnya ambigu menjadi lebih spesifik dan berdasar. Untuk menilai validitas dan ketahanan kesimpulan ini, validasi juga dilakukan selama penelitian.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses analisis data kualitatif yang bersifat induktif, di mana kesimpulan dibangun berdasarkan hasil temuan empiris di lapangan. Setelah data dikumpulkan

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan kondisi aktual pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten.

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola temuan yang konsisten dari berbagai sumber informasi, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan warga. Peneliti melakukan triangulasi sumber untuk membandingkan dan memverifikasi keabsahan data yang diperoleh. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, peneliti mengkaji hubungan antar tema seperti bentuk program pemberdayaan, peran pemerintah desa, tingkat partisipasi masyarakat, kendala pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan warga.

Kesimpulan tidak hanya berupa rangkuman temuan, tetapi juga merupakan hasil sintesis dari pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang diteliti. Proses ini dilakukan secara hati-hati, objektif, dan didasarkan pada prinsip keterandalan data serta kejelasan argumentasi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara menyeluruh.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN WIROKERTEN, KAPANEWON

BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Kalurahan Wirokerten

Desa Wirokerten yang terletak di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdiri pada tanggal 9 Desember 1949. Desa ini diberi nama untuk menghormati seorang pahlawan yang oleh penduduk setempat dianggap sebagai pahlawan dan berjuang hanya untuk kehormatan kerajaan Mataram saat itu. Orang tersebut adalah Tumenggung Wirokerti, yang memimpin pasukan militer Sultan Agung. Oleh karena itu, desa ini masih disebut "Wirokerten" yang diambil dari kata "Wirokerti" untuk mengenang Tumenggung Wirokerti yang gagah berani. Desa Wirokerten yang asli terbentuk dari empat desa, yaitu Desa Mutihan yang dikepalai oleh Lurah Prawiro; Desa Banjarsari yang dikepalai oleh Lurah Wongso Wiharjo; Desa Tobrutan yang dikepalai oleh Lurah Kromo Arjo; dan Desa Batutirto yang dikepalai oleh Lurah Dolan Hadi.

Pada tanggal 9 Desember 1949, keempat (empat) pemukiman tersebut digabung menjadi Desa Wirokerten yang mempunyai susunan perangkat desa sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Lurah Kalurahan Wirokerten

No	Jabatan	Nama
1	Lurah	Prawiro Sudarno (kelurahan Batutirto)
2	Carik	Midarjo (Kelurahan Tobratan)
3	keamanan	Darto Supadmo (Kelurahan Batutirto)
4	sosial	Dwijo Sumarto (Kelurahan Batutirto)

No	Jabatan	Nama
5	kemakmuran	Zawawi (Kelurahan Banjarsari)
6	Kesra	Cokro Sudarno (kelurahan Mutihan)

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

Balai desa yang dibangun secara sederhana dan memiliki lapangan desa ini terletak di rumah Bapak Prawiro Sudarno di Desa Batutirto, atau yang lebih baru di Dusun Kapuh Kulon. Keenam orang ini merupakan leluhur para kepala desa Wirokerten yang pertama.

Selanjutnya, Kompleks Kantor Balai Desa Wirokerten direnovasi dan dibangun Gedung Pemerintahan Desa, Gedung Lembaga Desa, dan Gedung Serbaguna "Sasana Krida Wiratama". Bangunan-bangunan tersebut dapat digunakan untuk resepsi pernikahan warga, rapat desa, dan kegiatan olahraga. Di dalam Kompleks Balai Desa Wirokerten juga terdapat Musholah, Ruang FKPM, Kantor BKM, Kantor LKM-PUAP, Perpustakaan Desa, Gedung PKK, Puskesmas Pembantu, TK Pertiwi 25, dan SD Wirokerten. Setelah pembangunan tersebut, Desa Wirokerten dimekarkan menjadi delapan (delapan) dusun, yaitu: Grojangan, Botokenceng, Sampangan, Wirokerten, Kepuh Wetan, Kepuh Kulon, Glondong, dan Mutihan. Sejak Desa Wirokerten berdiri, Kepala Desa telah menduduki jabatan-jabatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Lurah Berdasarkan Tahun

No	Nama	Masa Jabatan	Lurah
1	Pawiro Sudarmo	1949 s/d 1994	Pertama
2	Drs. Wigidjana	1994 s/d 2000	Kedua
3	Pj. Muh Bardan	2000 s/d 2002	Ketiga
4	Endro Sulastomo, S.H	2002 s/d 2012	Keempat
5	Rakhmawati Wijayaningrum,S.E	2012/ sekarang	Kelima

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

B. Data Umum

1. Tipologi Kalurahan

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan

1	Persawahan	6	Pertambangan/galian
2	Perladangan	7	Kerajinan & industri kecil
3	Perkebunan	8	Industry sedang & besar
4	Perternakan	9	Nelayan
5	Jasa dan perdagangan		

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

Kalurahan Wirokerten masuk Tipologi Jenis Persawahan, dengan Luas Sawah 255,75 H. dari jumlah luas wilaya Kalurahan Wirokerten. Artinya Kalurahan Wirokerten termasuk didalam jenis tipologi Persawahan berdasarkan karakteristik kalurahan yang didominasi oleh lahan yang basah.

C. Kondisi Geografis

1. Luas dan batas wilayah

Kalurahan Wirokerten yang terletak di Kapanewon Banguntapan, kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yoyakarta. Luas wilayah kalurahan Wirokerten adalah: 386.17 ha dengan jumlah penduduk: ± 13.750 dengan jumlah Kepala Keluarga: ± 4.420 dengan Batas Wilayah Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, kabupaten Bantul terdiri dari:

Sebelah utara	Kalurahan Singosaren
Sebelah timur	Kalurahan Jambidan
Sebelah selatan	Kalurahan Pleret
Sebelah barat	Kalurahan Tamanan

2. Arbitrasi

Jarak Kalurahan Wirokerten Kepusat Kabupaten/Kota, yaitu:

Jarak dari Kalurahan Wirokerten ke Kapanewon Banguntapan 1 km

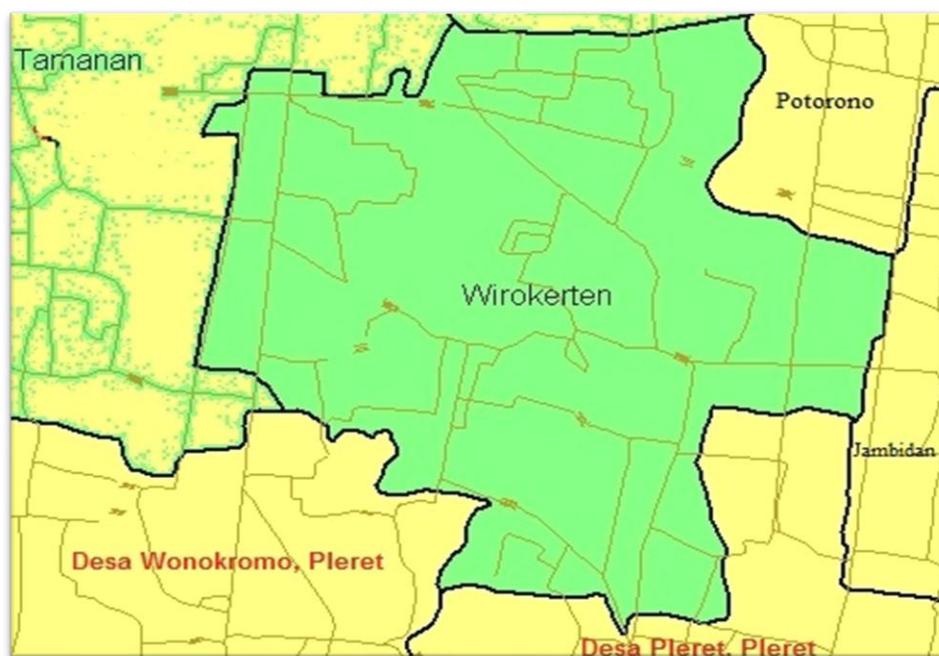
Jarak dari Kalurahan Wirokerten ke Pusat Provinsi adalah 7 km

Jarak dari Kalurahan Wirokerten ke Pusat Kabupaten adalah 15 km

Kalurahan Wirokerten memiliki lokasi yang strategis karena jaraknya yang relatif dekat dengan pusat-pusat pemerintahan. Jarak ke Kapanewon Banguntapan hanya 1 km, menunjukkan bahwa akses terhadap layanan administrasi tingkat kapanewon sangat mudah dan cepat dijangkau. Kedekatan ini mempermudah warga dalam mengurus berbagai keperluan administratif maupun mendapatkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kapanewon.

Selain itu, Kalurahan Wirokerten juga berada dalam jangkauan yang cukup dekat ke pusat-pusat pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan jarak 7 km ke pusat Provinsi dan 15 km ke pusat Kabupaten, aksesibilitas terhadap pelayanan tingkat provinsi maupun kabupaten tergolong baik. Hal ini mendukung kemudahan koordinasi dan pengembangan wilayah, serta memberikan keuntungan tersendiri dalam hal mobilitas dan pembangunan yang merata.

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Wirokerten



Sumber: Profil Kalurahan Wirokerten tahun 2023

D. Kondisi Demografis

1. Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kalurahan Wirokerten terdiri dari 4.420 kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 13.750 jiwa yang terdiri dari 6.811 jiwa penduduk laki-laki dan 6.939 jiwa penduduk Perempuan. Jumlah

penduduk tersebut akan di paparkan secara lengkap dalam table di bawah ini:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	6.811	49,53%
2	Perempuan	6.939	50,47%
	jumlah	13.750	100%

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.811 jiwa (49,53%) dan perempuan sebanyak 6.939 jiwa (50,47%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Wirokerten lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

2. Penduduk berdasarkan usia

Jumlah penduduk merupakan masalah penting yang perlu diperhatikan secara saksama. Di setiap daerah yang memiliki pemerintahan, jumlah penduduk merupakan komponen yang penting. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk, maka dapat dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki pemerintahan. Sudah barang tentu, penduduk berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam pemerintahan. Untuk menilai potensi sumber daya manusia Desa Wirokerten, maka penduduk harus dikelompokkan berdasarkan usia.

Tabel 2. 5 Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah (jiwa)
1	0-14	3.521
2	15-59	8.661
3	Di atas 60 tahun	1.568
	Jumlah	13.750

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

Dengan jumlah penduduk usia 15–59 tahun sebanyak 8.661 jiwa, kelompok usia dengan jumlah terbanyak pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Wirokerten berada pada usia kerja. Kelompok usia 0 hingga 14 tahun berada di urutan berikutnya, dengan jumlah penduduk 3.521 jiwa; sisanya 1.568 jiwa berusia di atas 60 tahun.

3. Penduduk berdasarkan Agama

Secara umum, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Wirokerten memeluk agama islam, namun ada juga yang beragama nonmuslim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 6 Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	13.532
2	Katolik	68
3	Kristen Protestan	141
4	Budha	4
5	Hindu	5
	Jumlah	13.750

Tabel di atas menunjukkan bahwa 13.532 jiwa dari total penduduk Desa Wirokerten beragama Islam, yang merupakan mayoritas masyarakat. Lebih lanjut, banyaknya masjid dan mushola di Desa Wirokerten menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa beragama Islam. Ada 141 jiwa yang mengidentifikasi diri sebagai pemeluk Kristen Protestan, yang merupakan mayoritas penduduk selain pemeluk Islam.

4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pekerjaan atau mata pencaharian merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia memiliki wawasan dan akal budi. Manusia dapat meningkatkan keterampilannya dan memperoleh karier yang diinginkan dengan kebijaksanaan. Namun, banyak orang tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan karena keterbatasan yang dimilikinya, baik dari segi keterampilan maupun ruang yang dimilikinya untuk berkembang. Pekerjaan tentu saja memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan seseorang dalam berbagai hal, baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Untuk menilai potensi kesejahteraan masyarakat, penduduk Desa Wirokerten harus dikategorikan menurut mata pencahariannya.

Tabel 2. 7 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencarian	Jumlah (jiwa)
1	Wiraswasta/Pedagang	1.402
2	Petani	48
3	Buruh Tani	461

No	Mata Pencarian	Jumlah (jiwa)
4	Pensiunan	172
5	PNS	332
6	karyawan	1.396
7	peternak	4
8	Buruh harian lepas	2.857
9	Lain-lain	7073
Jumlah		13.750

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan beragamnya mata pencaharian penduduk Desa Wirokerten. Dengan jumlah penduduk 2.857 jiwa, pekerjaan serabutan merupakan sumber pendapatan terbanyak. Jenis mata pencaharian sebagai pengusaha atau pedagang, yang jumlah keseluruhannya mencapai 1.402 orang, berada di urutan kedua.

5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan juga memiliki pengaruh untuk menentukan keterampilan dan keahlian seseorang. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan pula oleh pendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan sangat dibutuhkan karena pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran demi meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal berpikir yang akan menentukan tindakan seseorang dalam bermasyarakat. Maka dari itu perlunya mengklasifikasikan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan untuk melihat potensi-potensi SDM yang ada di Kalurahan Wirokerten.

Tabel 2. 8 Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum/Tidak Sekolah	2.704
2	Belum tamat SD/Sederajat	1.508
3	Tamat SD	2.390
4	Tamat SLTP	1.874
5	Tamat SLTP/SMA	3.846
6	Diploma I/II	103
7	Diploma III/Sarjana Muda	383
8	Diploma IV/Strata I	1.154
9	Strata II	132
10	Strata III	16
Jumlah		13.750

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Wirokerten yang tamat SD sebanyak 2.390 jiwa, merupakan mayoritas penduduk. Disusul oleh penduduk yang tamat SMA sebanyak 3.846 jiwa. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Wirokerten sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Penduduk Desa Wirokerten juga memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yakni sebanyak 1.154 jiwa berpendidikan sarjana, 132 jiwa berpendidikan magister, dan 16 jiwa berpendidikan doktor. Dari segi pendidikan, Desa Wirokerten sangat beruntung dan berkembang pesat karena penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

6. Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana sangat penting karena dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, prasarana dan sarana menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah, yaitu pembangunan, pemberdayaan, pengaturan, dan pelayanan, dijalankan. Agar Desa Wirokerten dapat maju dan berkembang, prasarana dan sarana harus dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Prasarana dan sarana yang tersedia di Desa Wirokerten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Prasarana Kesehatan

Tabel 2. 9 Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah (unit)
1	Pukesmas Pembantu	1
2	Posyandu Balita	17
3	Posyandu Lansia	10
4	Posbindu	1
5	Rumah Bersalin	1
6	Prakter Dokter	3
7	Praktek Bidan	2
8	Apotek	4
Jumlah		39

Sumber: Monografi Kalurahan Wirokerten tahun 2023

Dari data statistik di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Wirokerten memiliki layanan kesehatan yang memadai. Setiap dusun memiliki Posyandu, apotek, tempat praktik dokter dan bidan, serta puskesmas pembantu. Tujuan dari prasarana dan sarana

kesehatan di Desa Wirokerten adalah untuk memudahkan pemeliharaan kesehatan penduduk setempat. Untuk membantu warga Desa Wirokerten dalam menjaga kesehatan, desa ini juga memiliki kader kesehatan ibu-ibu yang setiap bulan memberikan penyuluhan kesehatan kepada balita, lansia, dan seluruh anggota keluarga.

2. Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan sangat bermanfaat untuk membentuk kepribadian dan moral manusia untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian prasarana sangat diperlukan, sama halnya di Kalurahan Wirokerten ada beberapa prasarana pendidikan yang ada sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	PAUD	6
2	TK	5
3	SD	4
4	SMP	1
5	SMA	2
6	Sekolah Tinggi/Universitas	2
7	Taman Pendidikan Alqur'an	17
8	Kelompok Belajar Masyarakat	1
Jumlah		38

Sumber: RPJMKalWirokerten Tahun 2023

Seperti yang dapat dilihat dari tabel di atas, Desa Wirokerten memiliki fasilitas pendidikan yang sangat baik. Pendidikan PAUD memiliki gedung terbanyak (6 gedung), diikuti oleh gedung TK (5 gedung) dan sekolah dasar (4 gedung). Kemudian ada SMP dan SMA yang hanya memiliki satu unit. Dua ST/Universitas juga terletak di Desa Wirokerten.

3. Prasarana Ibadah

Sarana peribadatan merupakan sarana yang sangat dibutuhkan di suatu daerah, karena saranaperibadatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakatnya.

Tabel 2. 11 Prasarana Ibadah

No	Prasarana	Jumlah (unit)
1	Masjid	24
2	Mushola	27
	Jumlah	51

Sumber: Monografi Kalurahan Wirokerten tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Wirokerten memiliki sarana ibadah yang sangat baik. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Wirokerten terdapat dua puluh tujuh mushola dan dua puluh empat tempat ibadah. Mengingat mayoritas penduduk Desa Wirokerten beragama Islam, maka sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Wirokerten hanya berupa tempat ibadah yang bercorak Islam, berdasarkan data yang peneliti

kumpulkan dari salah satu perangkat desa dan buku monografi Desa Wirokerten tahun 2023.

4. Prasarana Umum

Prasarana Umum adalah sarana fasilitas yang menunjuk pada fasilitas umum yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kalurahan Wirokerten. Hal ini sangat penting untuk membantu keperluan warga dalam melakukan kegiatan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 12 Prasarana Umum

No	Jenis Prasarana umum	Jumlah (unit)
1	Olahraga	7
2	Balai Pertemuan	4
3	Sumur Kalurahan	4
Jumlah		15

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2023

Dari data statistik di atas terlihat bahwa Desa Wirokerten memiliki sarana dan prasarana publik yang memadai. Terdapat tujuh sarana olahraga, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Keikutsertaan dalam berbagai ajang olahraga tingkat desa sangat bermanfaat bagi warga Desa Wirokerten. Selain itu, Desa Wirokerten juga memiliki Sumur Desa yang terdiri dari empat unit dan Balai Pertemuan. Warga Desa Wirokerten dapat mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan DPRD tanpa harus menyewa tempat karena adanya Balai Pertemuan.

D. Keadaan Budaya & Sosial

Kalurahan Wirokerten memiliki 13 kelompok kesenian Tradisional, yaitu 2 kelompok jatilan dan 1 kelompok karawitan. Selain itu terdapat juga 2 kelompok campur sari dan 10 kelompok hadroh. Faktor rasa cinta terhadap budaya dan kesenian memuat Kalurahan Wirokerten memiliki beberapa kelompok kesenian. Ini juga salah satu cara agar generasi selanjutnya bisa mengenal dan mengetahui kesenian tradisional, supaya kesenian tradisional ini bisa dikenal oleh anak cucu masyarakat Kalurahan Wirokerten nantinya.

Mayoritas mata pencarian penduduk kalurahan Wirokerten adalah sebagai buruh harian lepas. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha mikro dan kecil.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Wirokerten yang masih tinggi menjadikan Desa Wirokerten harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Kalurahan Wirokerten seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

E. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di kalurahan Wirokerten amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa:

1. Sumber Pendapatan Kalurahan
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas kalurahan
- b. Bangunan desa yang dikelola Kalurahan
- c. Lain-lain kekayaan milik Kaluarahan

F. Keuangan Kalurahan Wirokerten

Keuangan desa adalah semua hak dan Kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segalah sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan Kewajiban desa.

Semua pendapatan desa, atau dalam hal ini pendapatan desa wirokerten, berasal dari rekening desa, yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran dan tidak dapat dikembalikan oleh kepala desa. Berdasarkan pendapatan desa yang sebenarnya untuk tahun berjalan, pendapatan desa dihitung.

Pendapatan Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4,865,866,100.00 (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 13 Pendapatan Kalurahan Wirokerten

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan asli Kalurahan	658,212,600.00
Pendapatan Transfer	4,195,653,5000.00
Pendapatan lain-lain	12,000,000.00
Total Pendapatan	4,865,866,100.00

Sumber: APBKal Kalurahan Wirokerten 2024

Pendapatan Kalurahan Wirokerten diatas adalah didasarkan pada hasil evaluasi pendapatan Kalurahan Tahun 2024 yang mengacu pada pagu indikatif Dana Desa/Kalurahan bersumber dari APBN, Dana ADD, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan khusus yang telah diatur oleh Peraturan Bupati terkait.

Terlihat pada tabel di atas menunjukan bahwa Kalurahan Wirokerten memproleh total pendapatan sebesar Rp 4,865,866,100.00 tahun 2024. Kalurahan Wirokerten memiliki beberapa sumber pendapatan, tetapi pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan terbesar dari total pendapatanya. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, belanja kalurahan yang kemudian diklasifikasikan dalam beberapa point sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- b) Pelaksanaan pembangunan kalurahan;
- c) Pembinaan kemasyarakataan kalurahan;

- d) Pemberdayaan masyarakat kaourahan; dan
- e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

Dalam pendapatan tentunya tidak terlepas dari pengeluaran, hal ini merupakan wujud dari pengembangan pembangunan dari suatu kalurahan terhadap kondisi kalurahan yang kemudian harus tetap dikawal dalam setiap program yang terjadi dalam suatu kalurahan. Angaran-anggaran yang di salurkan tersebut merupakan suatu solusi dari setiap permasalahan yang terjadi, kerena dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa anggaran juga sebagai *support* atau sumber utama dalam penyelsaian setiap permasalahan masyarakat dan pemerintah, dengan demikian anggaran tersebut direalisasikan sebagaimana mestinya.

G. Lembaga Pemerintahan Desa

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan.

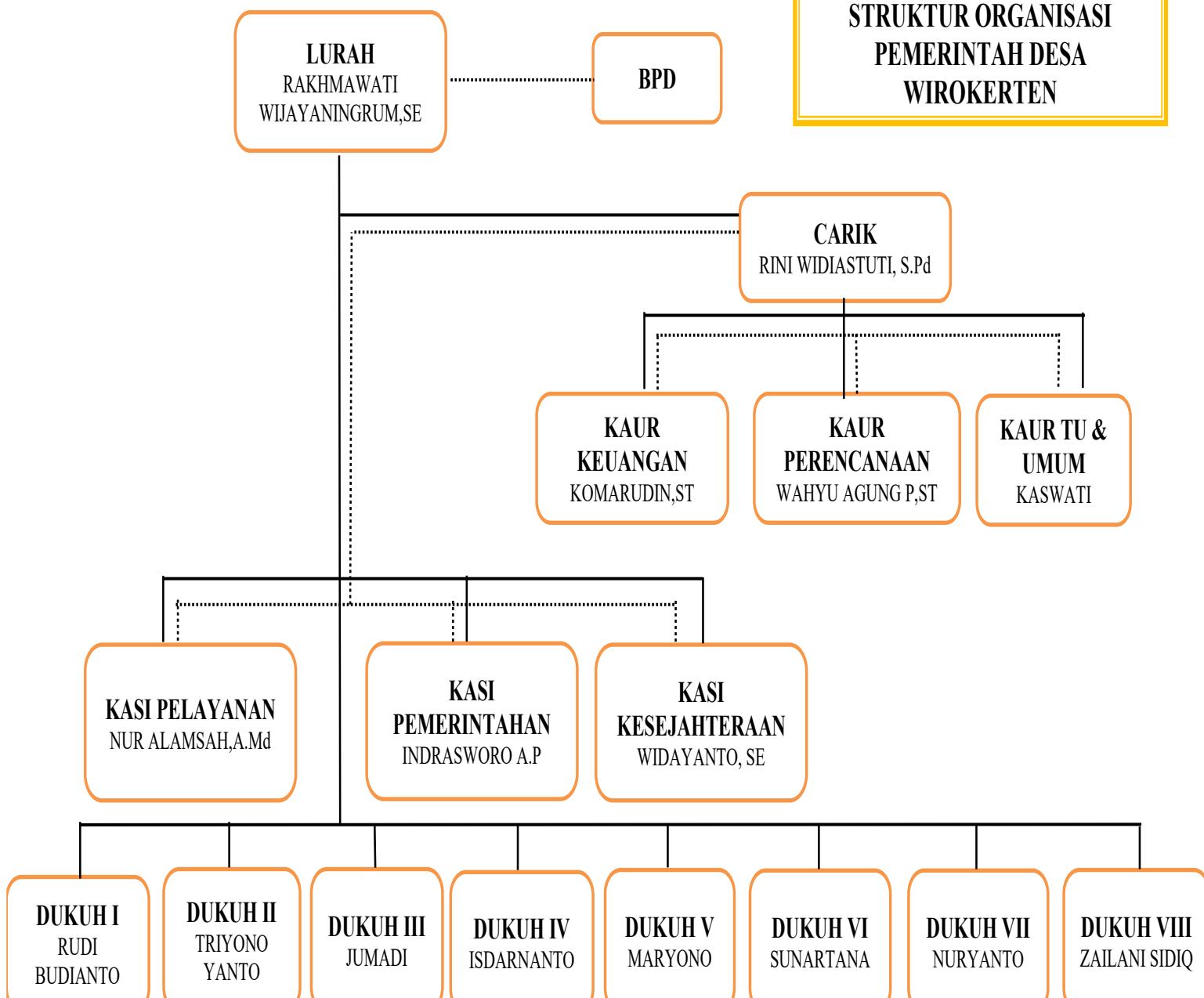
1. Struktur Organisasi Kalurahan Wirokerten

Organisasi pemerintahan kalurahan Wirokerten di bawah merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintahan pusat agar pemerintah desa memahami tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengatur dan mengurus masyarakat yang ada di kalurahan demi mewujudkan pembangunan desa.

Struktur organisasi yang ada di Kalurahan Wirokerten juga merupakan susunan perangkat pemerintahan di tingkat desa atau kalurahan yang berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Struktur ini dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta partisipatif.

Struktur ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kalurahan, namun secara umum mencerminkan pembagian tugas yang jelas demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan partisipatif di tingkat lokal. Berikut dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan yang ada di Wirokerten:

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA
WIROKERTEN**



KETERANGAN:

- : garis komando / tanggung jawab
- : garis koordinasi

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wirokerten

Sumber: RPJM Kal Wirokerten tahun 2024

DATA PERSONIL PERANGKAT KALURAHAN WIROKERTEN

Tabel 2. 14 Data Personil Kalurahan Wirokerten

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Rakhmawati Wijayaningrum,SE	Lurah Desa
2	Rini Widiastuti,S.Pd	Carik Desa
3	Indrasworo Agung Pribadi	Kasi Pemerintahan
4	Nur Alamsah, A.Md	Kasi Pelayanan
5	Widayanto,SE	Kasi Kesejahteraan
6	Komarudin,ST	Kaur Keuangan
7	Wahyu Agung Prayitno,ST	Kaur Perencanaan
8	Kaswati	Kaur TU dan Umum
9	Rudi Budianto	Dukuh Grojogan
10	Triyono Yanto	Dukuh Botokenceng
11	Jumadi	Dukuh Sampangan
12	Isdarnanto	Dukuh Wirokerten
13	Maryono	Dukuh Kepuh Wetan
14	Sunartana	Dukuh Kepuh Kulon
15	Nuryanto	Dukuh Glondong
16	Zailani Sidiq	Dukuh Mutihan
17	Musiyem	Staf Desa
18	Marsimin	Staf Desa
19	Darmadi	Staf Desa
20	Fitri puji Isnani,A.Md	Staf Desa
21	Sabella Megarani	Staf Honorer Desa
22	Supar Sawabi	Staf Honorer Desa

Sumber: RPJM Kal Wirokerten tahun 2024

2. Visi dan Misi Kalurahan Wirokerten

Visi Pemerintahan Kalurahan Wirokerten seperti yang tertuang didalam RPJMKal periode 2019-2026 adalah sebagai berikut: ***“memwujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan inovatif berdasarkan nilai-nilai keagamaan”.***

Berkaitan dengan visi lurah Wirokerten tersebut, sebagai upaya dan tekad Pemerintah Kalurahan Wirokerten untuk senantiasa memwujudkan Kalurahan Wirokerten menjadi Kalurahan yang masyarakatnya mandiri secara ekonomi, sejahtera secara pendidikan, kesehatan dan keamanan, masyarakat berbudaya yang menghargai, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, seni, dan tradisi yang menjadi identitas jati diri dan inovatif, kreatif dalam menjawab masalah-masalah yang ada, serta mampu mengadopsi teknologi dan pengetahuan baru serta berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan moral dan etika dalam berperilaku, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan sesama lingkungan Kalurahan Wirokerten.

Untuk mencapai visi Kalurahan Wirokerten, ditetapkan misi sebagai Pemerintahan Kalurahan Wirokerten seperti yang tertuang didalam RPJMKal Periode 2019-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan, mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, adil dan bertanggungjawab;

- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan, mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas.
- 3) Peningkatan Kesehatan Masyarakat, mewujudkan pemenuhan pelayanan kesehatan dan kenyamanan bagi warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan upaya menuju warga masyarakat Desa Wirokerten yang sehat;
- 4) Penanggulangan Kemiskinan, mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi dengan menjalin kerjasama pemerintah, swasta dan instansi terkait sehingga sistem informasi desa dapat berperan dalam memberikan manfaat secara ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum difabel dan berkebutuhan khusus, sehingga warga masyarakat tersebut dapat lebih berdaya dalam berbagai bidang kegiatan yang ada, yang akan mewujudkan Desa Wirokerten yang ramah difabel dan berkebutuhan khusus;
- 5) Ketahanan pangan dan Infrastruktur, mewujudkan desa Wirokerten yang tertata secara fisik dan sosial kesyarakatan, membentuk desa wisata sebagai bentuk peningkatan pengetahuan tentang pariwisata dan masyarakat berdaya dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi seni, budaya, pertanian dan olah raga dalam masyarakat dapat berkembang, lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat dengan tujuan sebagai penambah pendapatan bagi keluarga sehingga dapat terwujud Desa Wirokerten yang sejahtera;

- 6) Lingkungan Hidup dan Bencana, mewujudkan lingkuungan yang nyaman, asri, dan bersahabat juga membentuk masyarakat yang bersahabat dengan alam dan bencana;
- 7) Peningkatan Nilai Kebudayaan, mewujudkan kebaikan, kebenaran dan keadilan bagi warga masyarakat yang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk menciptakan kerukunan dan saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat akibat perbedaan agama, keyakinan, organisasi, sosial budaya dan lain-lain;

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya sebagai menunjang keberhasilan dan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

3. Pemberdayaan Masyarakat Wirokerten

Ditengah keterbatasan dan ketertinggalan Kalurahan Wirokerten terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

Tabel 2. 15. Daftar Bidang Pemberdayaan Wirokerten

Bidang peberdayaan masyarakat	Sub Bidang Pertanian dan Perternakan	
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
		Peningkatan Kapasitas BPD
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	

		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL

Sumber: RKP Kal Wirokerten Tahun 2024

Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tercantum dalam dokumen tersebut mencerminkan upaya holistik dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sub-bidang yang saling terkait. **Pertama** Bidang Pertanian dan Peternakan fokus pada pemeliharaan infrastruktur irigasi, pelatihan teknologi tepat guna, dan fasilitasi kelompok masyarakat seperti GAPOKTAN dan (Perkumpulan petani pemakai air) P3A menunjukkan pentingnya pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memastikan keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi kelompok. **Kedua** Bidang Peningkatan kapasitas, Pelatihan untuk perangkat aparatur desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan transparan. Ini adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip good governance. **Ketiga** Bidang Anak dan Keluarga. Program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pelatihan untuk penyandang disabilitas mencerminkan komitmen terhadap inklusi sosial dan kesetaraan gender. Upaya ini tidak hanya melindungi kelompok

rentan tetapi juga memberdayakan mereka untuk berkontribusi aktif dalam masyarakat. **Keempat** Bidang UMKM dan Koperasi.

Pengembangan sarana prasarana dan pelatihan produksi pangan sehat bagi UMKM menunjukkan dukungan terhadap ekonomi masyarakat. Dengan memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro dan koperasi, program ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi lokal.

Kelima Bidang Dukungan Penanaman Modal. Pelatihan pengelolaan BUMKal dan fasilitasi pertemuan BUMKal/PEMKal bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa dan langkah strategis untuk mendorong produk lokal dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Bidang pemberdayaan masyarakat ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan multidimensi mulai dari pertanian, tata kelola desa, perlindungan sosial, hingga penguatan ekonomi program ini tidak hanya menjawab kebutuhan praktis tetapi juga membangun fondasi untuk transformasi sosial-ekonomi jangka panjang. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan dampak yang nyata dan terukur.

4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Wirokerten

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun daftar anggota BPKal Kalurahan Wirokerten seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16 Daftar Anggota BPKal

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Yogasworo,SE	Ketua
2	Agus Widodo	Wakil Ketua
3	Marjuni	Sekretaris
4	Sukadi	Kepala bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat
5	Rita Andriani	Penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
6	Cipta Mulya	Anggota
7	Nur Widayati	Anggota
8	Sutarto	Anggota
9	Dwi Eko	Anggota

Sumber: RPJMKal Wirokerten tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, BPKal merupakan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil-wakil warga desa, yang mana proses demokrasi menentukan keterwakilan daerah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPKal) Wirokerten

berjumlah sembilan (9) orang. Pemilihan BPKal dilakukan secara demokratis melalui musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat, dan perwakilan dipilih dari delapan dusun yang ada saat ini. BPKal bertugas menyelenggarakan musyawarah desa untuk pemutakhiran peraturan RPJMKal Kalurahan berdasarkan hasil kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, tugas BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa dalam menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa. Salah satu tugas utamanya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa. BPD menjadi jembatan antara warga dengan kepala desa, memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersampaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, BPD menggali berbagai masukan dari warga sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan arah kebijakan desa.

Fungsi pengawasan juga menjadi peran penting BPD dalam pemerintahan desa. BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai demokrasi. Dalam praktiknya, BPD dapat meminta keterangan dan laporan pertanggungjawaban dari kepala desa terkait pelaksanaan program, penggunaan anggaran, maupun penyelesaian masalah di tingkat lokal. Dengan demikian, BPD berperan

sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan kepala desa agar pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA

DI KALURAHAN WIROKERTEN

Pada bab ini peneliti akan mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemberdayaan tersebut.

Program pemberdayaan yang dianalisis meliputi kegiatan pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam beberapa kasus, desa yang menerapkan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program mampu menciptakan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kapasitas masyarakat.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya sejumlah permasalahan, seperti rendahnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, serta dominasi elite desa dalam menentukan arah program. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat hanya menjadi objek program, bukan subjek yang aktif dalam pembangunan desa mereka sendiri.

Pemerintah desa yang berhasil menjalankan pemberdayaan terhadap Masyarakat desa umumnya memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dukungan dari kepala desa dan perangkat desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik sangat memengaruhi efektivitas kebijakan pemberdayaan.

Aspek penting lainnya adalah kapasitas sumber daya manusia, baik dari aparat desa maupun masyarakat penerima manfaat. Di beberapa desa, minimnya pemahaman tentang konsep pemberdayaan menyebabkan program berjalan secara formalitas tanpa dampak nyata. Sebaliknya, di desa yang memiliki pendamping lokal yang kompeten, proses pemberdayaan berjalan lebih optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, aparat desa, dan peserta program pemberdayaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap awal memunculkan rasa kepemilikan terhadap program, yang pada akhirnya mendorong keberlanjutan kegiatan tersebut.

Sebaliknya, ketika program dirancang secara *top-down* tanpa memperhatikan kebutuhan lokal, partisipasi masyarakat cenderung rendah. Misalnya, pelatihan keterampilan yang tidak sesuai dengan potensi ekonomi desa hanya akan menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat jangka panjang bagi warga desa.

Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seharusnya tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi strategi jangka panjang yang terintegrasi dengan visi pembangunan desa. Pemberdayaan harus dimaknai sebagai proses membangun kapasitas, bukan sekadar menyalurkan bantuan.

Berdasarkan temuan penelitian dengan menyoroti fokus dari penelitian ini disarankan agar pemerintah desa lebih aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta memperkuat kelembagaan lokal. Ketiga aspek ini merupakan fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing dalam pembangunan jangka panjang.

Pembahasan selanjutnya secara spesifik akan dijelaskan hasil temuan di lapangan berdasarkan teori dan analisis pemberdayaan yang dikembangkan oleh Terry Wilson (dalam Nyoman S., 2005:130) menjelaskan bahwa ada empat (4) tahap proses pemberdayaan yaitu tahap *awakening, understanding, harnessing* dan *using* yang apabila keempatnya dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan kesejateraan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang tidak optimal dapat mempengaruhi penyusunan kegiatan pelaksanaan pemerintah kalurahan kerena ketika masyarakat tidak diberdayakan dengan baik maka, pemerintah kalurahan tidak akan dapat memahami dengan baik apa yang dibutuhkan warga tersebut.

A. Membangkitkan kesadaran masyarakat akan peran dan potensi diri (*Awakening*) di Wirokerten

Menurut Wilson. T. (2005). Tahap pertama dalam proses pemberdayaan adalah *awakening*, yaitu membangkitkan kesadaran individu terhadap potensi dan nilai-nilai yang dimilikinya. Wilson menekankan bahwa kesadaran ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses transformasi pribadi dan organisasi.

Kesadaran ini melibatkan refleksi mendalam terhadap diri sendiri, termasuk pengenalan terhadap kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi. Individu diajak untuk mengevaluasi kembali keyakinan dan asumsi yang selama ini membentuk perilaku dan keputusan mereka. Dalam konteks organisasi, *Awakening* berarti menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk menyadari peran dan kontribusi mereka secara lebih luas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, diskusi kelompok, dan umpan balik konstruktif.

Wilson percaya bahwa tanpa kesadaran yang kuat, individu cenderung terjebak dalam rutinitas dan tidak mampu melihat peluang untuk berkembang. Oleh karena itu, tahap ini menjadi fondasi bagi langkah-langkah selanjutnya dalam proses pemberdayaan. Dengan membangkitkan kesadaran, individu mulai memahami bahwa mereka memiliki kendali atas hidup dan karier mereka, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pertumbuhan pribadi dan profesional mereka.

Selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Wirokerten (Bapak Widiyanto, S.E) dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Kami mulai dari mendekati warga melalui forum musyawarah dusun. Di forum itu kami bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak warga untuk menggali potensi di lingkungannya. Kami tekankan bahwa setiap orang punya potensi, entah itu keterampilan, pengalaman, atau jaringan sosial. Warga perlu sadar bahwa potensi itu bisa dikembangkan, dan mereka bukan objek pembangunan, tapi pelakunya. Kami libatkan tokoh masyarakat, kader PKK, karang taruna, supaya pendekatannya lebih dekat dan tidak kaku. Jadi bukan hanya program dari atas, tapi gerakan bersama dari dalam desa. Beberapa warga mulai aktif mengusulkan ide, misalnya pelatihan menjahit, pertanian organik, hingga daur ulang sampah. Itu tanda bahwa kesadaran mulai tumbuh”.

Peneliti melihat bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah desa dan aktor-aktor lain tidak bersifat *top-down*, melainkan melalui pendekatan humanis dan dialogis. Misalnya, informan dari pemerintah desa menyatakan bahwa mereka melibatkan tokoh lokal seperti ketua RT, PKK, dan Karang Taruna untuk mendekati warga secara personal dan emosional. Hal ini penting karena membangkitkan kesadaran tidak dapat dilakukan dengan pendekatan struktural saja, melainkan harus menyentuh sisi psikologis dan emosional masyarakat.

Peneliti juga mencatat bahwa paradigma ketergantungan menjadi salah satu hambatan klasik dalam tahap awal pemberdayaan, sehingga penting membangun kesadaran kemandirian melalui pelatihan dan teladan nyata. Ini menunjukkan adanya sinergi sosial yang kuat sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan kesadaran kolektif, hal yang

penting dalam tahap *Awakening*. Peneliti juga mengidentifikasi bahwa indikator keberhasilan awal adalah munculnya ide dari masyarakat sendiri, bukan semata mengikuti program desa.

Dalam wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Bapak Sukardi) menyampaikan bahwa:

“Iya mas. Bagi saya, pemberdayaan itu dimulai dari kesadaran. Kalau warga sadar dia punya kemampuan, dia pasti semangat maju. Saya sering bantu fasilitasi komunikasi antara warga dan pemerintah desa. Saya juga dorong warga untuk percaya diri. Misal, ada warga yang pintar bikin jajanan tapi malu jualan, saya bantu pasarkan lewat grup RT. Dulu kalau ada kegiatan, banyak yang pasif. Sekarang beberapa sudah mulai aktif, bahkan minta pelatihan tambahan. Ini perubahan bagus. Musyawarah RT atau dusun jadi tempat penting membangkitkan ide. Saya pastikan semua bisa bicara, terutama yang biasanya diam saja. Penting untuk terus berikan contoh sukses dari warga sendiri. Itu lebih mengena daripada ceramah atau teori”.

Peneliti mencatat bahwa tokoh lokal memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran warga, menjadi katalisator dalam transformasi sosial masyarakat. Ini selaras dengan pendekatan *awakening* yang menekankan pentingnya agen lokal (*agent of change*) dalam membangun kesadaran kolektif. Kesadaran tumbuh melalui observasi sosial, yang menurut Wilson adalah bentuk *experiential awakening*, yaitu warga sadar karena melihat keberhasilan nyata di sekitarnya. Peneliti melihat forum musyawarah bukan hanya untuk pengambilan keputusan, tapi juga sebagai ruang edukatif untuk membangun kesadaran kritis. Ini memperkuat ide bahwa perubahan kesadaran lebih efektif melalui model langsung daripada pendekatan normatif/*top-down*.



Gambar 3. 1 Pelatihan Pengelolaan Sampah

Kalurahan Wirokerten menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan sampah di Padukuhan Mutihan, Rabu 6 November 2024 di Pendopo Dukuh Mutihan. Pelatihan menghadirkan praktisi sampah dan pakar pengelola sampa dari "Resik Plus", Mas Bayu dan diikuti oleh perwakilan ibu-ibu Dasawisma di Padukuhan Mutihan, hadir dalam kesempatan ini Ulu-uluh Kalurahan Wirokerten, Dukuh Mutihan, Bamuskal Keterwakilan Mutihan, Ketua Pokgiat, Perwakilan Ketua RT. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan Bantul bebas sampah tahun 2026 melalui anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PBMP) yang diharapkan mampu mengatasi sampah dari keluarga, sampah hari ini, dipilah dan diolah hari itu juga.

Peneliti melihat bahwa, Pelatihan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan di Padukuhan Mutihan memberikan manfaat signifikan bagi pengembangan potensi diri masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola

sampah rumah tangga. Dengan memahami cara memilah dan mengolah sampah secara langsung di lingkungan tempat tinggal, masyarakat-terutama ibu-ibu Dasawisma terdorong untuk lebih peduli terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Pelatihan ini juga membuka ruang pembelajaran kolektif yang memupuk kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial terhadap persoalan sampah yang dihadapi bersama.

Lebih jauh, pelatihan ini dapat menjadi titik awal bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Dengan keterampilan yang diperoleh, warga dapat mengubah sampah organik dan anorganik menjadi produk bernilai guna atau bahkan bernilai jual, seperti kompos, ecobrick, atau kerajinan daur ulang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kreativitas dan kemandirian, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberi kontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.

Disampaikan juga salah satu masyarakat (Ibu Siti Rohmah) yang menyatakan bahwa:

“Ya mas, dulu saya merasa nggak punya kemampuan, cuma jaga anak dan masak di rumah. Tapi ternyata saya bisa belajar menjahit. Diajakin bu RT ikut pertemuan. Awalnya malu, tapi saya lihat ibu-ibu lain semangat, jadi saya ikut juga. Sekarang saya sadar, saya juga bisa produktif. Sudah mulai terima pesanan seragam sekolah dan daster. Suami juga dukung. Katanya saya jadi lebih semangat dan punya penghasilan sendiri, walau kecil. Semoga ada pelatihan lanjutan dan bantuan alat. Kalau bisa punya mesin jahit sendiri, saya bisa tambah penghasilan”.

Peneliti menilai ini adalah tipikal kondisi “*pra-awakening*”, di mana warga merasa tidak memiliki peran produktif. Kesadaran Ibu Siti muncul karena didorong oleh lingkungan sosial (RT), menunjukkan pentingnya stimulus eksternal di tahap awal pemberdayaan. Tahap ini mencerminkan hasil dari proses *awakening*, yaitu munculnya kepercayaan diri bahwa dirinya mampu dan memiliki potensi.

Peneliti menilai ini sebagai bukti konkret bahwa kesadaran yang tumbuh berdampak langsung terhadap fungsi produktif perempuan dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa kesadaran yang sudah tumbuh perlu ditopang oleh infrastruktur pendukung agar tidak kembali padam.

Dalam wawancara bersama perwakilan pemuda Karang Taruna (Fauzi Dwi Kurniawan) juga menyampaikan pendapatnya bahwa:

“Anak muda di sini dulu mikir kegiatan desa itu membosankan. Tapi setelah ada pelatihan digital marketing, mulai banyak yang tertarik. Kami gunakan media sosial buat kampanye kegiatan. Kami buat konten pendek soal peluang bisnis kecil, supaya mereka relate. Sekarang sudah ada 4 anak muda yang buka usaha kecil, mulai dari sablon, kopi literan, sampai jasa desain. Kalurahan sangat mendukung, bahkan mau bantu modal awal lewat dana BUMDes. Berdayakan pemuda dari apa yang mereka suka. Kalau dipaksa ikut kegiatan yang nggak sesuai minat, susah juga tumbuhkan kesadaran”.

Pernyataan ini menggambarkan kesenjangan partisipasi generasi muda, yang memerlukan strategi *awakening* yang relevan dan kontekstual. Peneliti mencatat bahwa pelibatan media sosial menjadi alat strategis dalam membangkitkan kesadaran pemuda, sesuai karakter mereka. Menunjukkan keberhasilan pendekatan *awakening* berbasis minat dan potensi kelompok

sasaran. Ini mencerminkan model pemberdayaan yang inklusif dan sinergis, yang penting untuk memperkuat kesadaran yang baru tumbuh. Analisis peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan *awakening* sangat tergantung pada kesesuaian konten dan gaya pendekatan dengan karakteristik kelompok sasaran.

Pernyataan diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pendamping lokal desa (PLD), Bapak Wawan dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Ya mas. Kami bantu desa menyusun program pemberdayaan yang realistik dan berbasis potensi lokal. Kami lebih banyak mendengarkan. Kami tanya: ‘Apa yang ingin Ibu/Bapak ubah di lingkungan ini?’, bukan langsung kasih solusi. Banyak warga yang sebenarnya punya potensi, tapi belum sadar atau tidak percaya diri. Dengan dialog dan fasilitasi, mereka mulai terbuka. Saya lihat Kalurahan Wirokerten berhasil dalam tahap awal ini. Banyak warga mulai aktif mengajukan ide. Tantangan ke depan adalah konsistensi. Kesadaran itu bisa hilang kalau tidak dirawat dengan pendampingan dan dukungan nyata”.

Peneliti melihat bahwa PLD berperan sebagai *external trigger* yang memfasilitasi proses tumbuhnya kesadaran tanpa memaksakan. Ini sangat penting dalam tahap *Awakening* untuk menghindari resistensi warga terhadap program pemberdayaan. Ini menunjukkan pentingnya proses pendampingan intensif agar kesadaran tidak hanya tumbuh, tetapi juga bertahan. Peneliti menilai bahwa indikator kesuksesan *awakening* adalah perubahan sikap warga dari pasif menjadi aktif menyuarakan gagasan. Peneliti mencatat bahwa kesadaran sosial yang tumbuh di tahap awal ini

harus dijaga dan dikembangkan ke tahap berikutnya (*Understanding, Harnessing, Using*).

Hasil wawancara dengan informan pemerintah desa, tokoh masyarakat, warga, pemuda, dan pendamping desa menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten dimulai dengan strategi membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi diri dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tahap *Awakening* dalam teori Terry Wilson, yang menekankan pentingnya membangkitkan kesadaran kritis sebagai langkah awal pemberdayaan.

Pemerintah desa secara aktif menggunakan musyawarah dusun (musdus), pertemuan warga, dan pelatihan awal sebagai media membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Penekanan pada nilai partisipasi dan potensi diri mulai ditanamkan sejak dini.

Strategi yang digunakan oleh pemerintah desa dan aktor-aktor lain tidak bersifat top-down, melainkan melalui pendekatan humanis dan dialogis. Misalnya, informan dari pemerintah desa menyatakan bahwa mereka melibatkan tokoh lokal seperti ketua RT, PKK, dan Karang Taruna untuk mendekati warga secara personal dan emosional. Hal ini penting karena membangkitkan kesadaran tidak dapat dilakukan dengan pendekatan struktural saja, melainkan harus menyentuh sisi psikologis dan emosional masyarakat.

Informasi ini didukung oleh testimoni tokoh masyarakat yang menyebut bahwa warga lebih mudah menerima perubahan ketika melihat contoh nyata di lingkungan sekitar. Kesadaran mulai tumbuh tidak melalui instruksi, tetapi melalui refleksi sosial yang relevan dan dekat.

Wawancara dengan warga dan pemuda menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat. Warga yang awalnya pasif dan tidak percaya diri mulai melihat dirinya sebagai individu yang mampu berkontribusi dan memiliki potensi ekonomi. Contohnya, Ibu Siti Rohmah menyatakan bahwa ia awalnya merasa tidak punya keahlian, namun setelah mengikuti pelatihan, ia sadar bahwa menjahit bisa menjadi sumber penghasilan.

Pemuda pun mulai sadar akan peluang di era digital. Karang Taruna mampu memanfaatkan media sosial untuk menarik partisipasi anak muda, sehingga kesadaran akan potensi diri dan peluang usaha pun tumbuh secara organik.

Dari wawancara dengan pendamping desa dan pemerintah, diketahui bahwa faktor pendorong utama adalah pendekatan partisipatif dan keteladanan dari lingkungan sekitar. Namun, hambatan yang sering muncul adalah mentalitas ketergantungan dan kurangnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, tahap *Awakening* membutuhkan waktu dan proses yang tidak instan. Pendamping desa menyatakan pentingnya mendengarkan aspirasi warga terlebih dahulu sebelum mendorong perubahan. Strategi seperti ini terbukti efektif dalam menggugah kesadaran tanpa menimbulkan resistensi.

Keberhasilan tahap *Awakening* mulai terlihat dari meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan pelatihan, munculnya usulan dari warga sendiri, dan perubahan sikap warga dari pasif menjadi aktif. Beberapa warga sudah mulai membuka usaha kecil, memproduksi barang, bahkan memasarkan produknya secara *online*. Ini membuktikan bahwa program pemberdayaan di Kalurahan Wirokerten tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menyentuh perubahan cara pandang masyarakat terhadap diri dan lingkungannya.

Tahap *Awakening* di Kalurahan Wirokerten telah menunjukkan keberhasilan awal dalam membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi diri mereka. Keberhasilan ini didukung oleh strategi pendekatan yang dialogis, pelibatan tokoh lokal, pelatihan partisipatif, dan dorongan dari lingkungan sekitar. Meskipun masih ada tantangan, seperti sikap apatis dan ketergantungan, tanda-tanda perubahan positif telah muncul secara bertahap.

B. Meningkatkan pemahaman kolektif tentang proses dan tantangan pemberdayaan (*understanding*) di Wirokerten

Setelah kesadaran tercapai, tahap berikutnya adalah *understanding*, yaitu memahami secara mendalam konteks, struktur, dan dinamika yang memengaruhi kehidupan dan pekerjaan individu. Wilson menekankan pentingnya pemahaman ini untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Pemahaman ini mencakup analisis terhadap sistem sosial, budaya, dan ekonomi yang ada, serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi

posisi dan peran individu dalam masyarakat atau organisasi. Individu diajak untuk melihat gambaran besar dan memahami bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan sekitar.

Pemahaman ini juga tidak hanya terbatas pada potensi individu, tetapi juga mencakup pemahaman kolektif terhadap sumber daya yang tersedia, termasuk salah satunya pemanfaatan dana desa. Dana desa menjadi instrumen penting yang dikelola pemerintah desa dalam rangka mendukung berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, pemetaan potensi lokal, serta pengembangan kapasitas kelompok masyarakat.

Dalam konteks organisasi, *Understanding* berarti karyawan memahami visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta bagaimana peran mereka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Hal ini mendorong keterlibatan dan komitmen yang lebih tinggi. Wilson percaya bahwa pemahaman yang mendalam memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Dengan memahami konteks yang lebih luas, individu dapat menyesuaikan tindakan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tahap ini juga membantu individu mengidentifikasi hambatan dan sumber daya yang tersedia, sehingga mereka dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan mereka.

Untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai

pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberdayaan. Informan terdiri dari perangkat pemerintah kalurahan, tokoh masyarakat, warga peserta program, pemuda Karang Taruna, dan pendamping lokal desa.

Analisis terhadap hasil wawancara ini dilakukan berdasarkan tahapan proses pemberdayaan masyarakat menurut teori Terry Wilson, yang meliputi: *awakening* (membangkitkan kesadaran), *understanding* (memahami potensi), *harnessing* (memanfaatkan potensi), dan *using* (menggunakan potensi secara berkelanjutan).

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil analisis wawancara yang difokuskan pada tahap kedua, yaitu *understanding*, yang bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat memahami potensi, aset, serta strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan di lingkungan mereka. Analisis ini tidak hanya menyoroti persepsi dan pemahaman individu terhadap potensi lokal, tetapi juga melihat sejauh mana proses fasilitasi dan pelibatan oleh pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta peran aktif masyarakat telah membentuk pemahaman strategis dan kesadaran kolektif sebagai landasan untuk keberlanjutan program pemberdayaan.

Dalam wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Kalurahan Wirokerten (Bapak Widiyanto, S.E) menyampaikan bahwa:

“Iya mas. Setelah warga mulai sadar akan potensi dirinya, kami lanjutkan dengan membekali mereka melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Misalnya dalam program pemberdayaan ekonomi, kami tidak hanya memberi

pelatihan teknis, tetapi juga edukasi tentang manajemen usaha, perizinan, dan pemasaran. Tapi memang tidak semua warga langsung paham. Ada yang mengira pelatihan itu cuma ‘penggugur kewajiban’ atau semacam formalitas saja. Ini jadi tantangan kami. Beberapa warga yang dulu tidak tahu apa itu NIB (Nomor Induk Berusaha) sekarang sudah mengurus sendiri. Bahkan ada kelompok ibu-ibu yang belajar digital marketing untuk produk makanan ringan mereka. Itu pencapaian yang membanggakan. Memang sebetulnya, banyak warga yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, atau perencanaan jangka panjang. Beberapa hanya fokus pada hasil cepat. Hambatan lainnya adalah ketimpangan akses informasi, terutama untuk warga lanjut usia atau yang tidak terbiasa dengan teknologi”.

Tahap *understanding* pada warga masyarakat menurut informan dari pihak pemerintah Kalurahan berjalan melalui pendekatan edukatif yang sistematis. Pemerintah Kalurahan secara aktif menyelenggarakan pelatihan tidak hanya teknis, tetapi juga manajerial seperti edukasi legalitas, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas kognitif dan keterampilan masyarakat.

Namun demikian, peneliti mencatat bahwa tidak semua warga mampu langsung menangkap informasi yang disampaikan. Masih terdapat pemahaman yang keliru bahwa pelatihan hanya sebagai formalitas atau bentuk rutinitas belaka. Ini menunjukkan bahwa tahapan *understanding* belum sepenuhnya merata dan masih diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual serta komunikatif.

Hambatan utama yang teridentifikasi dari hasil wawancara adalah persepsi warga yang menginginkan hasil instan tanpa memahami pentingnya tahapan proses. Selain itu, ketimpangan akses informasi juga

menjadi faktor signifikan, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat kurang melek teknologi. Oleh karena itu, strategi pendampingan personal dan pendekatan berbasis kelompok kecil menjadi sangat penting.

Keberhasilan dalam tahap ini mulai terlihat ketika beberapa warga mulai memahami pentingnya legalitas usaha dan bahkan mampu mengurusnya secara mandiri. Hal ini mencerminkan tumbuhnya pemahaman terhadap hak dan peran warga dalam sistem sosial ekonomi desa. Warga tidak lagi hanya menjadi objek, tetapi telah mulai menunjukkan inisiatif sebagai subjek pemberdayaan.

Secara umum, analisis peneliti terhadap informan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam membangun pemahaman masyarakat cukup berhasil, namun masih menghadapi tantangan dalam penyampaian yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menekankan pentingnya kehadiran pendamping desa yang mampu menjembatani pemahaman warga dalam konteks kebijakan dan praktik nyata pemberdayaan.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Tokoh Masyarakat Bapak Sutrisno dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kalau awal-awal dulu, banyak warga berpikir bahwa yang punya peran itu cuma pemerintah desa. Tapi sekarang, lewat forum musyawarah dan pelatihan, pelan-pelan mereka mulai sadar bahwa program bisa berhasil kalau mereka juga terlibat aktif. Warga mulai paham bahwa mereka bukan sekadar penerima manfaat, tapi juga pelaku. Contohnya, saat ada program pelatihan hidroponik, beberapa warga malah membuat kelompok belajar mandiri. Mereka minta difasilitasi lahan dan bikin kebun kecil bersama. Itu terjadi karena mereka paham manfaat dan tujuan jangka panjangnya”.

Wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman warga terhadap program pemberdayaan tidak serta-merta muncul, tetapi dibentuk melalui proses panjang yang melibatkan komunikasi dan musyawarah. Pada awalnya, warga memiliki persepsi bahwa semua urusan pemberdayaan merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Ini menandakan masih lemahnya kesadaran akan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Namun, dengan pendekatan informal seperti musyawarah warga dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pelatihan, warga perlahan mulai memahami bahwa mereka memiliki peran penting dalam keberhasilan program. Ini menunjukkan bahwa proses *understanding* membutuhkan ruang-ruang partisipatif untuk refleksi dan pembelajaran bersama.

Peneliti mencatat adanya perubahan paradigma masyarakat dari pasif ke aktif, yang merupakan indikator penting dalam keberhasilan tahap *understanding*. Warga tidak lagi menunggu program datang, tetapi sudah mulai menunjukkan inisiatif, seperti membentuk kelompok tani hidroponik. Inisiatif ini muncul bukan karena instruksi formal, tetapi dari pemahaman akan manfaat jangka panjang.

Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan kolaboratif antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan warga. Tokoh masyarakat berperan sebagai jembatan komunikasi yang memperkuat kepercayaan warga terhadap program desa. Ini sangat relevan dengan pendekatan *empowerment*

dalam teori Wilson yang menekankan peran lokal dalam membentuk kesadaran dan pemahaman kolektif.

Dengan demikian, analisis peneliti menyimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat sangat krusial dalam membentuk pemahaman warga. Penguatan kapasitas tokoh masyarakat dalam pendekatan komunikasi yang membangun kesadaran kolektif menjadi strategi yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini disampaikan juga oleh salah satu pelaku UMKM (Ibu Ismiyarsih) menyampaikan bahwa:

“Saya belajar banyak mas. Dulu saya cuma bisa masak dan jual ke tetangga, sekarang saya paham cara mengatur harga, buat kemasan menarik, sampai memasarkan lewat *WhatsApp* dan *Facebook*. Saya juga baru ngerti pentingnya izin usaha, walaupun prosesnya agak ribet. Memang awalnya bingung juga, apalagi istilah-istilah seperti NIB, PIRT, atau omzet. Tapi karena ada pendampingan dari desa dan kelompok UMKM, saya bisa pelan-pelan belajar”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahap *understanding*, warga seperti Ibu Ismiyarsih mengalami proses belajar yang cukup signifikan. Dari yang awalnya tidak memahami konsep legalitas, pengemasan, hingga pemasaran digital, ia kini mampu menerapkan semua itu dalam usahanya. Hal ini menandakan proses internalisasi pemahaman telah terjadi dengan baik.

Namun proses tersebut tidak mudah. Peneliti mencatat bahwa hambatan dalam bentuk istilah teknis dan prosedur yang rumit membuat sebagian warga merasa minder dan bingung. Oleh karena itu, keberhasilan dalam tahap *understanding* sangat bergantung pada metode penyampaian materi pelatihan yang mudah dipahami dan pendampingan yang intensif.

Faktor pendukung utama dalam proses pemahaman warga adalah adanya komunitas atau kelompok yang saling mendukung. Ibu Ismiyarsih mengaku terbantu karena adanya bimbingan dan sharing antar pelaku UMKM lainnya. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial dalam kelompok lebih efektif daripada pembelajaran individu.



Gambar 3. 2 UMKM Wirokerten

Kalurahan Wirokerten yang masih didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh harian lepas, suatu pekerjaan yang cenderung tidak stabil dan rentan terhadap perubahan ekonomi. Kurangnya lapangan kerja yang sepadan dengan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan kerja dan ketersediaan peluang ekonomi lokal. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kondisi ini menuntut peningkatan pemahaman warga tentang pentingnya kemandirian ekonomi serta keterlibatan aktif dalam proses pembangunan yang berorientasi pada penguatan kapasitas diri dan kolektif.

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemberdayaan adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa transformasi ekonomi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pekerjaan formal, melainkan juga pada kemampuan untuk menciptakan dan mengelola peluang usaha secara mandiri, khususnya melalui usaha mikro dan kecil. Untuk itu, proses pemberdayaan harus mencakup edukasi kewirausahaan, penguatan akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat memahami bahwa pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya yang ada secara produktif. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, kebijakan yang inklusif, serta sinergi antara pemerintah kalurahan dan lembaga pendukung lainnya.

Pemahaman yang terbentuk juga berdampak pada perubahan sikap dan perilaku. Ibu Ismiyarsih mulai aktif mencari informasi tambahan dan berani memasarkan produknya ke luar wilayah desa. Peneliti melihat ini sebagai indikator bahwa pemahaman tidak hanya bersifat kognitif, tetapi telah bertransformasi menjadi tindakan nyata.

Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik dan komunitas merupakan strategi efektif dalam membangun *understanding* di kalangan masyarakat desa, khususnya perempuan pelaku UMKM. Perlu penguatan dari sisi pendampingan lanjutan agar pemahaman ini terus berkembang.

Selanjutnya penyampain dari perwakilan Karang Taruna Kalurahan Wirokerten (Mas Ryan Dhani) menyampaikan pendapat bahwa:

“Iya Mas. Sekarang sudah lebih paham, meski dulu banyak yang cuek. Lewat kegiatan Karang Taruna dan pelatihan digital, kami sadar bahwa generasi muda bisa bantu promosi produk lokal, jadi admin media sosial UMKM, atau bikin konten promosi. Jadi sekarang kami lebih aktif. Tantangannya, kadang anak muda kurang sabar. Mereka ingin hasil instan. Jadi kadang harus dibimbing pelan-pelan biar paham bahwa pemberdayaan itu proses, bukan hasil seketika”.

Dari hasil wawancara dengan Mas Ryan, peneliti menemukan bahwa generasi muda memerlukan pendekatan khusus untuk membangun pemahaman mereka terhadap pemberdayaan. Ketertarikan mereka terhadap aspek digital dan kreativitas menjadi celah penting yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses pemahaman.

Pada awalnya, banyak pemuda yang tidak tertarik atau merasa tidak memiliki hubungan dengan kegiatan desa. Namun, dengan adanya pelatihan *digital marketing*, *content creation*, dan pengelolaan media sosial UMKM, pemahaman mereka mulai tumbuh. Mereka menyadari bahwa pemberdayaan juga bisa menjadi ruang ekspresi dan kontribusi sesuai dengan kemampuan mereka.

Hambatan yang dihadapi adalah adanya budaya instan. Banyak pemuda yang berharap hasil langsung setelah pelatihan. Ini menjadi tantangan dalam membangun pemahaman jangka panjang tentang proses, perencanaan, dan keberlanjutan. Peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan

mentoring yang bersifat personal dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.

Meski begitu, adanya inisiatif pemuda yang menawarkan diri menjadi admin media sosial UMKM desa merupakan contoh keberhasilan dalam tahap *understanding*. Mereka tidak hanya memahami peran mereka, tetapi juga menciptakan kontribusi nyata bagi ekosistem pemberdayaan lokal.

Peneliti melihat bahwa pemuda bisa menjadi kekuatan transformatif dalam pemberdayaan desa jika didekati dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus merancang program berbasis minat dan keterampilan digital untuk memperkuat proses pemahaman mereka.



Gambar 3. 3 Pelatihan *Leadership* Karang Taruna

Guna meningkatkan kemampuan *leadership*, karang taruna wiroatama manunggal kalurahan wirokerten menggelar pelatihan *leadership* untuk pengurus dan angota karang taruna. pentingnya pelatihan *leadership* untuk generasi muda kahususnya karang taruna, karana karang tarunalah yang

nantinya sebagai calon penerus pemimpin pemimpin Indonesia khususnya kalurahan wirokerten, kamituwa juga berterimakasih kepada karang taruna yang selalu mau bersinergi melaksanakan kegiatan kegiatan bersama pemerintah kalurahan wirokerten.

Pelatihan *leadership* bagi Karang Taruna bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tangguh, visioner, dan mampu menjadi motor penggerak dalam proses pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan. Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks, Karang Taruna dituntut tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan berpikir strategis, komunikasi efektif, pengambilan keputusan, serta kemampuan membangun kerja sama lintas sektor.

Melalui pelatihan ini, Karang Taruna diharapkan mampu membaca dinamika masyarakat, mengenali potensi lokal, serta merancang program-program pemberdayaan yang berorientasi pada kebutuhan riil warga, terutama di kalangan pemuda. Tantangan seperti rendahnya akses terhadap peluang ekonomi, minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan kurangnya ruang aktualisasi diri dapat diatasi jika pemuda memiliki kepemimpinan yang kuat dan berwawasan kolektif. Dengan demikian, pelatihan leadership ini menjadi investasi strategis dalam mencetak pemimpin-pemimpin lokal yang mampu menginisiasi perubahan dan mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Kemudian melalui wawancara yang disampaikan oleh Pendamping Desa (Bapak Wawan) dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Warga sebenarnya punya antusias, tapi pemahaman teknis dan konseptual masih kurang. Misalnya, mereka kadang belum paham alur perencanaan partisipatif, belum mengerti kenapa harus ikut musrenbang. Tapi kami bantu lewat diskusi kelompok, kunjungan rumah, dan media sederhana. Indikator untuk mereka mulai memahami adalah ketika warga mulai bisa menyampaikan gagasan dalam forum, bertanya soal prosedur usaha, atau mengusulkan program pelatihan lanjutan, itu tandanya mereka mulai ‘ngeh’ akan proses. Dan ini terjadi makin sering, artinya ada kemajuan”.

Sebagai pendamping desa, Bapak Wawan menyoroti pentingnya metode komunikasi dalam membangun pemahaman warga. Ia menyatakan bahwa pendekatan harus dimulai dari mendengarkan kebutuhan warga, bukan langsung memberikan solusi teknis. Ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam tahap *understanding*.

Peneliti mencatat bahwa hambatan utama adalah kurangnya pemahaman warga terhadap perencanaan partisipatif. Banyak warga belum memahami kenapa mereka harus hadir di musrenbang, atau apa arti pentingnya proposal kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan media edukatif yang sederhana dan dekat dengan keseharian warga.

Indikator keberhasilan tahap ini terlihat dari mulai munculnya keberanian warga untuk bertanya, memberikan usulan, hingga mengkritisi program. Ini merupakan bentuk awal dari *critical awareness*, suatu capaian penting dalam tahapan pemberdayaan Wilson. Warga tidak hanya memahami program, tetapi mulai melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Pendamping lokal berperan vital dalam menjembatani pemahaman teknis dan sosial. Ia menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa program dapat diterjemahkan dengan baik dan diserap oleh warga dalam konteks yang benar.

Peneliti menyimpulkan bahwa peran pendamping lokal sangat menentukan dalam mempercepat proses *understanding*. Keberadaan mereka bukan hanya teknis administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berinteraksi langsung dengan dinamika masyarakat.

Tahap *understanding* merupakan tahapan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena pada titik inilah kesadaran warga terhadap peran, hak, dan tanggung jawab mulai terbentuk secara lebih terarah. Pemahaman bukan hanya menyangkut pengetahuan tentang program, tetapi juga pemahaman atas posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan berbasis partisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, peneliti menemukan bahwa upaya pemerintah Kalurahan Wirokerten dalam membangun pemahaman masyarakat telah dilakukan secara sistematis. Melalui berbagai program pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan, pemerintah desa tidak hanya mengedukasi secara teknis, tetapi juga berusaha menanamkan semangat kemandirian dan kolaborasi.

Namun demikian, proses pemahaman ini tidak berlangsung secara seragam. Terdapat variasi tingkat pemahaman antar individu dan kelompok masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, akses

informasi, usia, dan pengalaman sebelumnya dalam berorganisasi maupun berwirausaha.

Hambatan yang paling menonjol dalam tahap ini adalah ketimpangan informasi dan resistensi terhadap perubahan. Beberapa warga masih berpikir secara pragmatis dan menginginkan hasil cepat tanpa memahami pentingnya proses yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan satu arah, tetapi perlu komunikasi dua arah yang membangun kepercayaan.

Di sisi lain, peneliti mencatat beberapa capaian positif yang menunjukkan keberhasilan tahap *understanding*. Misalnya, munculnya inisiatif warga untuk mengurus legalitas usaha, keterlibatan aktif dalam forum musyawarah, hingga terbentuknya kelompok usaha bersama secara mandiri. Ini menjadi indikator bahwa masyarakat mulai memahami esensi dari program pemberdayaan itu sendiri.

Peran tokoh masyarakat, pendamping lokal desa, dan komunitas pemuda sangat signifikan dalam membentuk pemahaman kolektif. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat luas, sekaligus agen penyebar informasi dan motivasi. Melalui pendekatan informal dan kedekatan emosional, proses pemahaman menjadi lebih kontekstual dan diterima secara alami oleh masyarakat.

Selain itu, pendekatan berbasis kelompok seperti Karang Taruna dan kelompok UMKM terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman warga. Model pembelajaran kolektif, diskusi terbuka, dan praktik langsung mampu

mempercepat transfer pengetahuan sekaligus membangun rasa saling percaya antar warga.

Peneliti juga menilai bahwa keberhasilan tahap *understanding* dapat dilihat dari tumbuhnya *critical awareness* masyarakat terhadap program yang dijalankan. Warga tidak lagi bersikap pasif, tetapi mulai mampu memberikan masukan, mengkritisi, dan bahkan menginisiasi kegiatan sendiri. Ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam keberlanjutan program pemberdayaan.

Namun demikian, agar capaian pada tahap *understanding* dapat berkembang lebih luas dan mendalam, dibutuhkan strategi yang lebih inklusif. Pemerintah desa perlu mempertimbangkan segmentasi masyarakat dalam menyampaikan program, memperluas media informasi, dan meningkatkan kualitas fasilitator lapangan yang mendampingi warga secara intensif.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa tahap *understanding* di Kalurahan Wirokerten telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, namun proses ini telah menanamkan pondasi penting bagi tahapan pemberdayaan berikutnya. Keberhasilan dalam membentuk pemahaman masyarakat akan menjadi titik tolak menuju kemandirian dan keberdayaan yang sejati.

C. Menggali dan mengelola potensi lokal sebagai sumber kekuatan masyarakat (*harnessing*) di Wirokerten

Tahap ketiga adalah *Harnessing*, yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Wilson menekankan

pentingnya mengenali dan mengoptimalkan potensi internal dan eksternal dalam proses ini.

Sumber daya internal meliputi keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki individu. Sementara itu, sumber daya eksternal mencakup jaringan sosial, teknologi, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Individu diajak untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya ini secara efektif. Dalam konteks organisasi, *Harnessing* berarti menciptakan sistem dan proses yang memungkinkan karyawan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini dapat mencakup pelatihan, mentoring, dan akses ke informasi yang relevan.

Wilson percaya bahwa dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, individu dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka. Hal ini juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Tahap ini menekankan pentingnya proaktivitas dan inisiatif individu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul.

Melalui wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Kalurahan Wirokerten (Bapak Widiyanto, S.E) menyampaikan bahwa:

“Setelah pelatihan dan pemetaan potensi yang dilakukan bersama BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan), kami mulai mendampingi warga membentuk kelompok-kelompok usaha sesuai bidangnya. Misalnya, ibu-ibu pengrajin kami bantu akses ke pelatihan dari Dinas Koperasi, lalu kami bantu buatkan koperasi simpan pinjam agar mereka punya permodalan. Untuk petani, kami dorong pembuatan pupuk organik mandiri dengan bahan lokal. Tantangan terbesarnya adalah konsistensi warga. Awalnya semangat, tapi ketika hasil belum langsung terasa, mereka mulai mundur. Lalu

soal regenerasi, anak-anak muda kurang tertarik dengan pertanian misalnya. Ini PR kita bersama”.

Pernyataan Bapak Widiyanto menunjukkan bahwa pemerintah desa telah aktif mengelola potensi masyarakat pasca identifikasi tahap awal. Langkah-langkah seperti membentuk kelompok usaha, mendampingi akses pelatihan, dan mendirikan koperasi simpan pinjam menjadi wujud konkret dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat secara terorganisir.

Pendekatan yang dilakukan menunjukkan adanya keterpaduan kebijakan antara pemerintah desa dengan dinas terkait. Ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga yang menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi lokal secara sistematis. Namun, pernyataan mengenai tantangan berupa inkonsistensi partisipasi warga mengindikasikan bahwa keberlanjutan program masih bergantung pada kesadaran internal warga. Artinya, potensi hanya akan optimal bila diiringi dengan penguatan motivasi internal dan keteladanan dari pelaku yang berhasil.

Bapak Widiyanto juga menyinggung masalah regenerasi. Ini merupakan isu yang sangat penting dalam konteks desa. Minimnya minat generasi muda untuk terlibat dalam potensi lokal seperti pertanian menunjukkan adanya jurang persepsi yang perlu dijembatani.

Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa desa telah menjalankan fungsi fasilitator yang cukup baik, tetapi perlu penguatan pada aspek pembinaan lanjutan dan pemberian insentif partisipasi berkelanjutan.

Misalnya, memberi penghargaan kepada kelompok usaha yang konsisten atau membuka akses pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, dalam tahap *harnessing*, Kalurahan Wirokerten menunjukkan pola kerja yang terstruktur, namun perlu lebih memperhatikan strategi mempertahankan keberlanjutan usaha warga, termasuk penguatan komunitas pelaku dan pendampingan yang berkesinambungan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Rt dan Tokoh Masyarakat (Bapak Lukman Hidayat) mengatakan bahwa:

“Mas. Kami punya potensi kerajinan anyaman bambu. Sudah turun-temurun. Lewat kerja sama dengan desa, beberapa warga dapat pelatihan desain kemasan dan dijual lewat online oleh anak-anak Karang Taruna. Sekarang sudah mulai dipesan luar daerah. Masyarakat butuh contoh sukses. Kalau satu usaha berhasil, yang lain akan ikut. Jadi kita dorong lewat kader atau tokoh masyarakat untuk terus menggerakkan kelompok usaha ini”.

Wawancara dengan Bapak Suyanto memperlihatkan bahwa potensi warisan budaya seperti kerajinan anyaman telah diangkat menjadi kekuatan ekonomi lokal. Ini merupakan bentuk transformasi potensi tradisional ke dalam nilai ekonomi modern dengan melibatkan teknologi dan media sosial.

Peran anak muda sebagai penghubung antara warisan lokal dan teknologi menjadi aspek penting dalam upaya *harnessing*. Hal ini memperkuat gagasan bahwa pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari inovasi dan adaptasi zaman. Namun, keberhasilan yang disampaikan juga menggarisbawahi pentingnya figur panutan di masyarakat. Bagi warga,

melihat kesuksesan dari individu atau kelompok lain menjadi pendorong kuat untuk terlibat.

Ini membuktikan bahwa dalam tahap *harnessing*, pendekatan berbasis komunitas dan keteladanan menjadi faktor kunci untuk menggerakkan partisipasi luas. Pemerintah desa dapat mengembangkan program "Champion Lokal" untuk menumbuhkan inspirasi kolektif. Pengelolaan potensi masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan pelatihan atau fasilitas, tetapi juga perlu membangun semangat kompetisi sehat dan ekosistem saling dukung antar pelaku usaha lokal.

Kesimpulannya, potensi seperti anyaman bambu di Wirokerten memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Jika didukung dengan kebijakan pemasaran dan branding desa, potensi lokal ini bisa menjadi ikon pemberdayaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya disampaikan juga oleh pelaku UMKM dan ketua kelompok PKK RW 06 (Ibu Ismiyarsih) yang menyampaikan pendapat terkait potensi warga, khususnya ibu-ibu, sudah termanfaatkan dengan baik atau sebaliknya yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Iyah Mas. Alhamdulillah, sudah mulai. Dulu kami hanya bisa buat makanan rumahan, tapi sekarang karena pelatihan dari desa, kami bisa bikin kemasan yang lebih menarik dan dijual di koperasi. Saya juga jadi lebih percaya diri ikut bazar kelurahan. Kendalanya di modal awal dan pemasaran. Kalau kita produksi banyak, bingung jualnya. Untungnya pemerintah desa sekarang bantu lewat media sosial dan link ke koperasi atau dinas”.

Pernyataan Ibu Ismiyarsih memperlihatkan bahwa program pemberdayaan telah membuka akses keterampilan dan pasar kepada ibu-ibu

rumah tangga. Hal ini memperkuat posisi perempuan sebagai pelaku ekonomi produktif di tingkat keluarga maupun desa. Dengan adanya pelatihan dan bantuan pengemasan, produk lokal menjadi lebih kompetitif dan memiliki daya jual. Ini membuktikan bahwa potensi warga dapat diangkat melalui pendekatan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Ibu Ismiyarsih juga menambahkan terkait keterlibatan anggota PKK dalam menggerakkan usaha dan pemetaan potensi yang dalam wawancaranya menambahkan bahwa:

“Iya mas. Tentu saja. Kami rutin mengadakan pertemuan bulanan bukan hanya untuk kegiatan sosial, tapi juga diskusi usaha. Siapa yang bisa membuat kue, siapa yang punya pengalaman menjahit, itu kami data. Dari situ kami bentuk tim kecil untuk membuat produk bersama. Kami juga gotong royong dalam promosi, misalnya kalau ada satu yang jualan, yang lain ikut bantu promosi lewat WA grup dan media sosial”.

Hambatan utama yang diungkapkan, yaitu permodalan dan pemasaran, mencerminkan tantangan umum UMKM di desa. Meskipun potensi telah teridentifikasi, tanpa sistem distribusi dan akses pasar, maka keberlanjutan usaha akan terhambat.

Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangat krusial sebagai jembatan antara warga dan institusi eksternal, baik koperasi, dinas, maupun mitra bisnis. Sistem pendukung ini perlu dijadikan bagian dari kebijakan desa berbasis pemberdayaan. Secara sosiologis, pemberdayaan perempuan juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri dan partisipasi dalam ruang publik. Kegiatan usaha bersama memberi ruang interaksi sosial yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas lokal.

Berdasarkan wawancara ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan potensi oleh kelompok perempuan telah menunjukkan hasil nyata dan menjadi contoh baik dari implementasi tahapan *harnessing* dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya wawancara dengan pemuda Karang Taruna (Mas Ryan Dhani) juga menyampaikan terkait keterlibatan pemuda dalam mengelola potensi desa yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kami aktif di promosi digital. Banyak warga yang produknya bagus tapi tidak tahu cara jual online. Karang Taruna bantu bikin akun Instagram, foto produk, dan belajar digital marketing. Saya sendiri belajar dari YouTube, lalu ngajari teman-teman yang lain. Semoga pemerintah tetap *support*. Dan kami anak muda juga ingin ada *coworking space* di balai desa buat belajar bisnis dan desain. Biar makin semangat dan potensi kita nggak mandek”.

Mas Ryan sebagai perwakilan pemuda menampilkan potret keterlibatan generasi muda dalam pemanfaatan potensi desa. Kontribusi mereka dalam bidang digital marketing merupakan inovasi penting dalam mengelola potensi secara adaptif dan relevan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar aktivitas fisik seperti pelatihan produksi, tetapi juga melibatkan teknologi dan media informasi. Peran Karang Taruna menjadi vital sebagai penggerak transformasi digital di desa. Tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan fasilitas penunjang seperti ruang kreatif atau internet yang stabil. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan anggaran desa yang mengakomodasi kebutuhan generasi muda secara strategis.

Pernyataan Mas Ryan juga mengindikasikan adanya potensi besar dari kolaborasi lintas usia. Kaum muda sebagai pengelola digital, sementara orang tua sebagai produsen. Ini adalah bentuk integrasi potensi generasi yang dapat terus ditumbuhkan. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan pemberdayaan memperluas jangkauan potensi desa yang semula bersifat lokal menjadi lebih terbuka ke pasar nasional maupun global melalui *platform digital*.

Dari sini, peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi potensi digital adalah keniscayaan dalam pemberdayaan modern. Dengan strategi yang tepat, anak muda bukan hanya pelengkap, melainkan penggerak utama dalam tahapan *harnessing*.

Dalam wawancara selanjutnya yang disampaikan oleh pendamping desa (Bapak Wawan) mepertegas lagi terkait langkah konkret untuk memastikan potensi warga dapat dikelola secara optimal. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Salah satu strategi kami adalah pemetaan potensi berbasis keluarga. Misalnya, siapa yang punya lahan kosong, siapa yang bisa menjahit, atau punya keterampilan digital. Dari situ kami bantu buat kelompok usaha, dan difasilitasi lewat program dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Salah satunya adalah terbentuknya koperasi perempuan mandiri dan usaha hidroponik pemuda. Ini hasil dari warga yang sudah paham potensi mereka dan sekarang sudah bisa jalan sendiri. Kita tinggal kawal dan bantu akses ke mitra”.

Pendamping lokal desa memegang peran kunci dalam proses penguatan potensi masyarakat. Wawancara Pak Wawan menunjukkan adanya pendekatan mikro dalam memetakan potensi, yakni berbasis keluarga. Ini mencerminkan prinsip *bottom-up* dalam pemberdayaan.

Pendekatan ini memungkinkan pemberdayaan yang lebih spesifik dan menyentuh langsung potensi tersembunyi warga yang selama ini tidak tergarap maksimal. Ini juga membantu meminimalkan potensi konflik karena berbasis data faktual. Pak Wawan juga menyinggung keberhasilan program koperasi perempuan dan hidroponik pemuda, yang menjadi bukti nyata keberhasilan tahap *harnessing* dalam skala komunitas. Ini menunjukkan bahwa jika potensi dipetakan dan difasilitasi dengan benar, maka masyarakat bisa tumbuh secara mandiri.

Pendekatan berbasis pemetaan potensi dan data faktual terbukti mampu memberdayakan masyarakat secara lebih tepat sasaran dan efektif. Keberhasilan program koperasi perempuan dan hidroponik pemuda yang disampaikan oleh Pak Wawan menjadi contoh nyata bahwa ketika potensi lokal dikenali dan difasilitasi dengan baik, masyarakat dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga mampu meminimalkan potensi konflik karena didasarkan pada kondisi riil di lapangan, sehingga memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.

Berikut merupakan gambar perkebunan hidroponik di Kalurahan Wirokerten.



Gambar 3. 4 Perkebunan Hidroponik Kalurahan Wirokerten

Pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan ini. Tanpa kehadiran PLD yang aktif, banyak program pemberdayaan berisiko tidak berkelanjutan karena minimnya motivasi dan koordinasi. Pemerintah desa dan pendamping lokal perlu terus menyusun strategi jangka panjang, seperti menciptakan *roadmap* pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga potensi tidak hanya dimanfaatkan sementara tetapi menjadi aset permanen desa.

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa peran pendamping desa sangat strategis dalam membantu warga mengelola potensi secara sistematis dan terarah. Dukungan berkelanjutan dari PLD sangat penting dalam memperkuat tahap *harnessing* menuju pemberdayaan yang holistik.

Pemberdayaan masyarakat dalam tahap *harnessing* di Kalurahan Wirokerten menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah desa dan

masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang telah dikenali sebelumnya. Tahap ini mencerminkan proses pengelolaan sumber daya lokal yang diarahkan agar menjadi kekuatan produktif bagi masyarakat. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga pemuda, terlibat aktif dalam mengangkat potensi tersebut ke tingkat implementatif.

Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator utama dalam menyediakan wadah, regulasi, dan dukungan teknis. Kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas melalui koperasi, dan pembentukan kelompok usaha bersama merupakan strategi nyata dalam mengelola potensi lokal. Keterlibatan perangkat desa juga tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan, tetapi meluas pada proses pendampingan administratif seperti pengurusan legalitas usaha dan akses pelatihan dari dinas terkait.

Dari sisi masyarakat, terdapat semangat kolektif yang mulai tumbuh dan berkembang. Kelompok perempuan melalui PKK, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hartini, memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengorganisasi potensi anggotanya. Hal ini menciptakan sinergi antar warga yang memperkuat kohesi sosial dan membangun budaya gotong royong berbasis ekonomi. Potensi ini tidak hanya ekonomis, tetapi juga sosial dan kultural.

Pemuda, melalui Karang Taruna, memberikan kontribusi penting dalam konteks adaptasi teknologi dan pemasaran digital. Inovasi dalam

bidang promosi usaha dan media sosial menunjukkan bahwa potensi lokal di Wirokerten mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas jika dikelola secara kreatif dan kolaboratif. Ini menjadi kekuatan baru dalam dinamika pemberdayaan masyarakat yang tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa proses *harnessing* tidak lepas dari berbagai tantangan. Hambatan seperti rendahnya partisipasi berkelanjutan, kurangnya fasilitas teknologi, keterbatasan modal, serta kendala sosial-budaya seperti ketidakpercayaan diri sebagian warga menjadi catatan penting. Beberapa masyarakat masih menghadapi hambatan psikologis dan struktural untuk bisa sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ada.

Meski demikian, keberhasilan yang telah dicapai menjadi bukti bahwa dengan pendampingan yang tepat dan perencanaan yang terstruktur, pemberdayaan dalam tahap *harnessing* dapat menjadi pengungkit transformasi desa. Program hidroponik pemuda dan koperasi perempuan adalah contoh nyata bahwa potensi lokal bisa ditumbuhkembangkan melalui kerja sama yang berkelanjutan antara warga dan pemerintah desa.

Kunci keberhasilan tahap ini terletak pada keterlibatan aktif semua elemen desa, mulai dari warga sebagai subjek utama hingga pemerintah desa sebagai pengarah kebijakan. Peran pendamping lokal desa juga menjadi sangat strategis dalam memetakan potensi secara mikro dan membangun sistem evaluasi serta monitoring yang akurat. Pemetaan potensi yang berbasis

keluarga merupakan pendekatan cerdas untuk mendeteksi kekuatan tersembunyi masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan, *harnessing* bukan sekadar tahapan teknis, tetapi juga proses membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat adalah pemilik dari potensi yang mereka miliki. Proses ini menciptakan ruang belajar bersama, memunculkan tokoh-tokoh inspiratif lokal, dan memicu terjadinya transformasi sosial dari dalam. Proses ini menumbuhkan kemandirian dan memperkuat nilai keberdayaan secara menyeluruh.

Peneliti menilai bahwa Kalurahan Wirokerten telah berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat pada tahap ini. Walaupun belum sempurna, infrastruktur sosial yang terbentuk, semangat kolaboratif, dan terbukanya ruang-ruang partisipatif telah menjadi fondasi penting menuju pemberdayaan yang berkelanjutan. Apa yang dicapai hingga kini layak diapresiasi dan dijadikan contoh bagi desa-desa lain.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tahap *harnessing* di Kalurahan Wirokerten merupakan refleksi dari dinamika desa yang tidak hanya berupaya menggali potensi, tetapi juga mengelola dan memanfaatkannya secara sistematis dan berdaya guna. Dengan strategi yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, pemberdayaan masyarakat di Wirokerten berpeluang besar untuk terus berkembang menjadi praktik yang berhasil dan berkelanjutan.

D. Menerapkan hasil pemberdayaan dalam kehidupan bermasyarakat (*using*) di Wirokerten

Tahap terakhir dalam proses pemberdayaan adalah *using*, yaitu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang telah diperoleh untuk menghasilkan perubahan nyata. Wilson menekankan bahwa tindakan konkret adalah indikator utama dari pemberdayaan yang berhasil. Pada tahap ini, individu mulai mengambil tindakan yang mencerminkan pemberdayaan diri, seperti berpartisipasi aktif dalam komunitas, mengambil keputusan penting, atau memimpin inisiatif yang berdampak positif. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah mencapai tingkat kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi.

Dalam konteks organisasi, *using* berarti karyawan menerapkan ide dan solusi yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perusahaan. Hal ini mencakup implementasi proyek, inovasi proses, dan kolaborasi antar tim. Wilson percaya bahwa tindakan nyata adalah bukti dari transformasi yang telah terjadi dalam diri individu. Dengan menerapkan apa yang telah dipelajari dan dikembangkan, individu menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol atas kehidupan dan pekerjaan mereka.

Tahap ini juga menekankan pentingnya evaluasi dan refleksi terhadap tindakan yang diambil, untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Model pemberdayaan Terry Wilson ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk membantu individu dan organisasi

dalam proses transformasi menuju pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti keempat tahap ini, diharapkan individu dapat mencapai potensi maksimal mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam lingkungan mereka.

Konsep "*using*" dalam teori pemberdayaan menurut Wilson merujuk pada tahap penggunaan atau pemanfaatan sumber daya, kemampuan, dan potensi yang telah dimiliki atau dikembangkan oleh individu atau kelompok setelah melalui proses pemberdayaan. Dalam konteks pemerintahan desa dan masyarakat desa, konsep ini menjadi penting karena menandai titik ketika masyarakat tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi juga mampu menggunakannya secara efektif untuk perubahan sosial dan pembangunan.

Dalam lingkup pemerintahan desa, konsep "*using*" berarti bahwa aparat desa tidak hanya mendapatkan pelatihan dan pengetahuan administratif, tetapi juga secara aktif menerapkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah desa yang memberdayakan akan mendorong perangkatnya untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam tata kelola keuangan, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada level masyarakat desa, "*using*" menekankan pada kemampuan warga untuk memanfaatkan hak dan peluang yang tersedia. Misalnya, setelah mendapatkan pelatihan keterampilan dari program pemberdayaan, masyarakat desa diharapkan dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, seperti membuka usaha kecil atau meningkatkan hasil pertanian.

Tahap ini juga mencerminkan perubahan paradigma dari ketergantungan menuju kemandirian. Dalam teori Wilson, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari tersedianya akses atau kapasitas, tetapi sejauh mana kapasitas tersebut digunakan secara efektif oleh masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dilanjutkan pada pemanfaatan mandiri oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintah desa dapat memfasilitasi tahap "*using*" ini dengan menyediakan wadah dan sarana bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi. Contohnya adalah dengan mendukung koperasi desa, menyediakan ruang usaha, atau memperluas akses pasar. Ketika masyarakat diberikan kesempatan nyata untuk menggunakan hasil pemberdayaan, dampaknya akan lebih berkelanjutan.

Konsep ini juga menekankan pentingnya lingkungan pendukung. Tanpa dukungan kebijakan, regulasi, dan iklim sosial yang kondusif, kemampuan masyarakat untuk "*menggunakan*" hasil pemberdayaan akan terhambat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan bahwa hasil pemberdayaan tidak hanya berhenti di pelatihan, tetapi juga diikuti oleh kebijakan yang memudahkan pemanfaatannya.

"*Using*" juga berkaitan erat dengan kontrol sosial. Ketika masyarakat mampu menggunakan hasil pemberdayaan, mereka mulai menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa. Ini adalah salah satu

indikator bahwa pemberdayaan telah berjalan dengan baik-masyarakat tidak pasif, tetapi aktif mengawasi dan terlibat dalam proses pembangunan.

Dalam jangka panjang, tahap "*using*" berpotensi menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*). Masyarakat yang berhasil memanfaatkan hasil pemberdayaan akan menjadi contoh bagi komunitas lain. Inisiatif-inisiatif lokal pun tumbuh, menciptakan jejaring kerja sama dan inovasi antarwarga desa yang mempercepat pembangunan.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua proses pemberdayaan sampai pada tahap "*using*". Seringkali program berhenti pada tahap pelatihan atau pemberian bantuan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar mampu dan diberi ruang untuk menggunakan hasil pemberdayaan mereka.

Kesimpulannya, konsep "*using*" dalam teori Wilson menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan nyata dari hasil pemberdayaan. Dalam konteks desa, baik pemerintah maupun masyarakat harus didorong tidak hanya untuk memperoleh kapasitas, tetapi juga untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk pemberdayaan yang sesungguhnya-ketika masyarakat mampu mengelola dan menentukan masa depannya secara mandiri dan berkelanjutan.

**Desa Wisata Wirokerten meraih penghargaan 300 Besar
Desa Wisata Terbaik Tahun 2024 di Indonesia**



No	Kota/Kabupaten	Nama Desa Wisata
1	Kabupaten Kulon Progo	Desa Wisata Hargomulyo
2	Kabupaten Kulon Progo	Desa Wisata Purwosari
3	Kabupaten Kulon Progo	Desa Wisata Jatimulyo
4	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Dewi Carakan
5	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Dewi Sinta
6	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Wirokerten
7	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Dewi Mulia
8	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Jagalan
9	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Kaji
10	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Krebet
11	Kabupaten Bantul	Desa Wisata Bumi Mataram Pleret
12	Kabupaten Gunung Kidul	Desa Wisata Bunder
13	Kabupaten Sleman	Desa Wisata Gabungan
14	Kabupaten Sleman	Desa Wisata Nganggiring
15	Kabupaten Sleman	Desa Wisata Garongan

Gambar 3. 5 Desa Wisata Wirokerten Raih Penghargaan

Desa Wisata Wirokerten berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu dari 300 Desa Wisata Terbaik di seluruh Indonesia. Prestasi ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat Desa Wisata Wirokerten baru terbentuk selama satu tahun. Penghargaan tersebut menunjukkan dedikasi dan kerja keras komunitas desa dalam mengembangkan potensi wisata lokal yang ramah lingkungan dan berbasis budaya. Rendy Arif Budianto, salah satu pengurus Desa Wisata Wirokerten, memberikan komentarnya mengenai pencapaian ini. "Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh warga dan tim pengelola Desa Wisata Wirokerten. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi desa ini dan memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan."

Dengan pencapaian ini, Desa Wisata Wirokerten tidak hanya mendapatkan pengakuan di tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk promosi dan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Hal

ini tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya demikian, masih banyak bentuk pemberdayaan yang dihasilkan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Kalurahan Wirokerten. Dalam wawancara bersama Lurah Wirokerten (Ibu Rakhmawati Wijayaningrum, SE) melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan hasil dari program pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah desa menyebutkan bahwa:

“Program yang sudah dijalankan seperti pelatihan usaha kecil dan bantuan peralatan ternyata cukup berhasil. Sekarang, warga tidak hanya mengandalkan pekerjaan utama saja, tetapi juga punya usaha sampingan yang hasilnya bisa menopang ekonomi keluarga. Ada yang membuka usaha makanan ringan, ada yang menjahit, ada juga yang ikut menjual produk pertanian secara online. Itu membuat daya tahan ekonomi warga semakin kuat. Tantangannya adalah kesinambungan. Setelah pelatihan dan bantuan, kami masih melihat ada beberapa warga yang tidak melanjutkan usahanya. Mungkin karena kurang pendampingan lanjutan atau belum terbiasa mandiri. Tapi kami sudah mulai mengatasi ini dengan membentuk tim monitoring dari kalurahan agar bisa mengecek langsung perkembangan warga”.

Dari sudut pandang peneliti, pernyataan Lurah menunjukkan bahwa proses pemberdayaan telah sampai pada tahap *using*, di mana masyarakat mulai memanfaatkan hasil pelatihan dan bantuan yang telah diberikan. Ini menandai keberhasilan pemerintah desa dalam mengubah potensi menjadi tindakan nyata. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif mengelola sumber dayanya.

Pemanfaatan pelatihan kewirausahaan dan bantuan alat usaha seperti mesin jahit atau gerobak menunjukkan bahwa pendekatan praktis yang diterapkan pemerintah desa cukup efektif. Ketika warga dapat membuka usaha kecil-kecilan, ini berarti kapasitas ekonomi rumah tangga meningkat, dan ketergantungan terhadap pekerjaan informal tunggal dapat ditekan.

Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa tantangan utama dalam tahap *using* adalah konsistensi. Masyarakat belum sepenuhnya terbiasa mempertahankan usaha dalam jangka panjang tanpa dorongan eksternal. Di sini tampak bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan sistem dukungan yang tidak hanya pada awal program, tetapi juga pasca-implementasi.

Langkah kalurahan dalam membentuk tim monitoring menjadi strategi penting dalam menjaga kesinambungan. Hal ini selaras dengan prinsip *using* yang menekankan keberlanjutan dan kemandirian. Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai motivator sosial dan teknis bagi masyarakat untuk terus melangkah.

Dari sisi struktural, komitmen pemerintah desa untuk terus mengawal proses pasca-program menjadi indikator kuat bahwa pemberdayaan bukan sekadar proyek, melainkan proses transformatif jangka panjang. Ini juga menandakan bahwa nilai keberdayaan mulai terinstitusionalisasi dalam tata kelola desa.

Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa Lurah Wirokerten menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan partisipatif dalam mendorong

masyarakat memanfaatkan potensi yang telah dikembangkan. Hal ini memberi sinyal positif terhadap keberlanjutan agenda pemberdayaan di tingkat desa.

Disampaikan juga oleh RT 03 (Bapak Nur Sahit) terkait perubahan kehidupan masyarakat setelah program pemberdayaan berjalan yang dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Ya jelas terasa mas. Dulu banyak warga kami yang pasif, sekarang lebih aktif. Yang dulu hanya mengurus rumah tangga sekarang punya penghasilan tambahan. Anak-anak muda juga terlibat, mereka bantu orang tuanya jualan lewat media sosial. Bahkan ada yang bikin konten untuk promosi produk warga. Ini perubahan besar bagi kami. Untuk melihat apakah program-program menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan say aitu cukup menjawab. Misalnya pelatihan hidroponik itu awalnya diragukan, tapi sekarang hasilnya bisa dijual dan dikonsumsi sendiri. Jadi bukan hanya teori. Tapi kami harap ada pelatihan lanjutan seperti manajemen keuangan keluarga atau digital marketing biar hasilnya bisa terus berkembang”.

Dari wawancara dengan Ketua RT, tampak bahwa perubahan sosial sudah mulai terlihat di tingkat akar rumput. Masyarakat yang sebelumnya pasif kini mulai berinisiatif untuk memanfaatkan hasil pelatihan dan program desa. Perubahan ini menandai terjadinya internalisasi nilai pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari warga.

Keterlibatan anak muda dan ibu rumah tangga dalam aktivitas ekonomi lokal memperkuat pandangan bahwa *using* bukan hanya penerapan teknis, tetapi juga transformasi sosial. Penggunaan media sosial untuk promosi menandakan bahwa pemanfaatan potensi juga berkembang secara digital dan tidak terbatas pada cara-cara tradisional.

Namun, kesadaran baru ini belum sepenuhnya merata. Ada kebutuhan akan peningkatan kapasitas lanjutan, terutama dalam hal manajemen usaha dan keuangan. Ini menunjukkan bahwa *using* memerlukan bekal literasi ekonomi yang memadai agar potensi tidak berhenti pada tataran operasional, melainkan berkembang secara strategis.

Permintaan terhadap pelatihan lanjutan seperti manajemen keuangan keluarga dan digital marketing menunjukkan adanya permintaan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Hal ini penting dicatat oleh pemerintah desa agar kebijakan pemberdayaan tetap adaptif terhadap kebutuhan warga.

Ketua RT juga berperan sebagai aktor strategis di level komunitas. Beliau tidak hanya mengamati, tetapi juga mendorong, memotivasi, dan menyampaikan umpan balik kepada pemerintah desa. Peran RT dalam tahap *using* sangat penting untuk menjembatani antara program formal dan konteks sosial warga.

Peneliti melihat bahwa keberhasilan program pemberdayaan di tahap ini juga sangat ditentukan oleh aktor lokal seperti Ketua RT yang memahami konteks kultural dan dinamika sosial warganya. Hal ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan praktik pemberdayaan.

Dalam wawancara bersama salah satu pelaku usaha Kalurahan Wirokerten (Ibu Sumiyati) terkait dampak dari program pemberdayaan terhadap pelaku usaha, yang kemudian dalam wawancaranya memberikan pendapat bahwa:

“Setelah ikut pelatihan dan dapat bantuan bibit, saya mulai usaha jamur tiram. Dulu cuma coba-coba, sekarang

alhamdulillah sudah bisa panen rutin dan dijual ke warung-warung sekitar. Keuntungannya saya pakai untuk bantu anak sekolah dan tambahan belanja rumah. Saya juga ajari tetangga cara menanam jamur biar sama-sama bisa usaha. Masalahnya kadang di pemasaran. Kalau panen banyak, bingung jualnya. Saya masih butuh bantuan dari desa untuk bantu cari jaringan pembeli atau tempat promosi. Tapi dari sisi produksi sudah lumayan lancar”.

Ibu Sumiyati adalah contoh konkret dari warga yang telah mempraktikkan hasil pemberdayaan. Ia menunjukkan bahwa potensi yang ditumbuhkan melalui pelatihan tidak hanya digunakan untuk kepentingan individu, tetapi juga ditularkan ke warga lain. Ini mencerminkan semangat keberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Usaha jamur tiram yang awalnya berskala rumah tangga kini menjadi sumber penghasilan yang membantu kebutuhan pendidikan dan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan memberikan dampak ekonomi langsung dan mendukung ketahanan keluarga. Proses ini juga meningkatkan rasa percaya diri warga dalam mengelola sumber daya sendiri.

Namun demikian, kendala yang dihadapi Ibu Sumiyati dalam pemasaran mencerminkan pentingnya penguatan sistem hilir dalam pemberdayaan. Tanpa saluran distribusi yang jelas, hasil produksi berisiko tidak termanfaatkan optimal, bahkan bisa merugikan secara finansial. Ini menjadi tugas bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Perlu dicatat bahwa penggunaan hasil pemberdayaan dalam konteks ini tidak lepas dari dukungan lingkungan sosial. Tetangga yang diajak belajar menandakan bahwa transformasi sosial terjadi secara horizontal.

Pemberdayaan yang menyebar secara kolektif lebih menjanjikan ketahanan dan inklusivitas.

Peneliti melihat bahwa program pemberdayaan yang berhasil menciptakan pengusaha mikro seperti Ibu Sumiyati dapat dijadikan role model oleh pemerintah desa. Dokumentasi dan penyebarluasan praktik baik semacam ini penting untuk menciptakan efek domino pemberdayaan.

Oleh karena itu, praktik pemberdayaan yang telah digunakan secara produktif seperti ini perlu diperkuat dengan sistem pendukung seperti koperasi, jaringan pasar, dan pelatihan lanjutan agar warga tidak hanya menggunakan potensi sekali saja, tetapi secara berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara bersama perwakilan pemuda Karang Taruna Kalurahan Wirokerten (Mas Ryan) yang menyampaikan pendapat terkait apakah potensi anak muda sudah digunakan secara optimal dalam pemberdayaan ini, dalam wawancaranya menyebutkan bahwa:

“Kami mulai aktif mengelola media sosial desa untuk promosi UMKM warga. Beberapa teman saya juga bantu buatkan logo, kemasan, bahkan foto produk. Jadi kami menggunakan keterampilan desain dan digital marketing yang kami pelajari secara otodidak. Ini cara kami mendukung pemberdayaan dan juga menunjukkan bahwa pemuda punya peran nyata”.

Mas Ryan menunjukkan bahwa generasi muda di Wirokerten telah berhasil mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pemberdayaan masyarakat. Penggunaan keterampilan digital seperti desain, fotografi produk, dan manajemen media sosial adalah bentuk nyata dari pemanfaatan potensi generasi muda.

Tahap *using* yang dijalani oleh pemuda Wirokerten bukan hanya dalam bentuk konsumsi teknologi, tetapi penciptaan nilai ekonomi melalui digitalisasi produk lokal. Ini mengindikasikan bahwa potensi intelektual dan keterampilan pemuda desa telah dimanfaatkan untuk membangun kemandirian kolektif.

Namun, Mas Ryan juga menyoroti keterbatasan dalam hal pengembangan kapasitas formal. Meskipun pemuda belajar secara otodidak, ketidakterhubungan dengan pelatihan resmi dapat membatasi skala dampaknya. Oleh karena itu, pelatihan digital entrepreneur resmi menjadi kebutuhan mendesak.

Keterlibatan pemuda dalam program desa juga menjadi sarana regenerasi kepemimpinan desa. Mereka tidak hanya membantu promosi, tetapi juga belajar tentang manajemen, organisasi, dan pelayanan masyarakat. Ini adalah investasi sosial jangka panjang yang penting untuk kesinambungan desa.

Peneliti menilai bahwa sinergi antara pemuda dan struktur desa akan menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ke depan. Ketika potensi pemuda digunakan secara sistematis, maka perubahan desa akan menjadi lebih dinamis, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, tahap *using* di kalangan pemuda menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga ruang aktualisasi diri dan kontribusi terhadap komunitas. Ini membuka cakrawala baru bagi desa untuk membangun kapasitas generasi mudanya.

Selanjutnya wawancara bersama anggota PKK (Ibu Irianti) yang dalam wawancaranya menyampaikan pendapat terkait wujud nyata penggunaan hasil pemberdayaan di lingkungan masyarakat. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“PKK kami mulai punya kas sendiri dari hasil jualan produk olahan makanan. Kami gunakan kas itu untuk kegiatan sosial seperti santunan warga sakit, dan iuran pendidikan anak-anak kurang mampu. Jadi manfaat pemberdayaan ini bisa dinikmati seluruh warga, bukan hanya yang ikut usaha saja. Ini bukti nyata bahwa potensi yang ada bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama”.

PKK menjadi entitas sosial yang efektif dalam memanfaatkan hasil pemberdayaan. Ibu Listiani menjelaskan bagaimana hasil usaha kolektif digunakan untuk kebutuhan sosial warga seperti bantuan pendidikan dan kesehatan. Ini adalah contoh dari *using* yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Penggunaan hasil usaha tidak hanya meningkatkan ekonomi individu anggota PKK, tetapi juga memperkuat fungsi sosial kelompok. Dana kas PKK menjadi alat redistribusi yang adil dan mempererat solidaritas warga. Ini mencerminkan prinsip keberdayaan yang tidak ego-sentris, tetapi komunitarian.

Namun, Ibu Listiani juga menyiratkan pentingnya peningkatan kapasitas manajerial kelompok. Tanpa manajemen usaha yang baik, keuntungan kolektif bisa tidak terkelola dengan optimal. Di sinilah pentingnya pelatihan akuntansi sederhana, perencanaan kegiatan, dan penguatan organisasi.

Peneliti melihat bahwa PKK merupakan kekuatan sosial yang sangat potensial sebagai pelaksana pemberdayaan berbasis keluarga. Program-program pemberdayaan yang menyasar kelompok perempuan dapat lebih mudah menyebar karena adanya jejaring sosial yang kuat.

PKK juga berperan sebagai penghubung antara warga dan kebijakan desa. Ketika hasil pemberdayaan digunakan untuk kebutuhan sosial, hal itu memperkuat legitimasi program desa di mata warga. Ini menciptakan siklus timbal balik yang positif antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa model *using* yang dilakukan PKK sangat strategis dan perlu difasilitasi lebih lanjut dengan program pelatihan manajemen, legalisasi kelompok usaha, dan integrasi dengan BUMDes atau koperasi desa untuk memperbesar dampaknya.

Tahap keempat dalam model pemberdayaan menurut Terry Wilson, yakni *using*, merupakan momen krusial dalam proses transformasi masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat dari program, tetapi telah sampai pada titik di mana mereka menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan potensi yang telah dikembangkan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari kalangan pemerintah desa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa proses ini telah mulai berjalan secara nyata di Kalurahan Wirokerten.

Berbagai inisiatif masyarakat dalam menggunakan hasil pelatihan dan bantuan pemerintah menunjukkan bahwa proses pemberdayaan tidak berhenti

pada tahap penyadaran dan pemahaman, tetapi telah berlanjut pada pemanfaatan secara konkret. Misalnya, usaha jamur tiram oleh Ibu Sumiyati, pengelolaan media sosial produk lokal oleh Karang Taruna, serta usaha kolektif PKK yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Semua ini menunjukkan adanya semangat *self-help* yang menjadi indikator utama keberhasilan dalam tahap *using*.

Pemerintah desa sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan hasil pemberdayaan. Komitmen Lurah Wirokerten untuk membentuk tim monitoring dan pendampingan pasca-program merupakan langkah strategis yang mencerminkan kesadaran bahwa proses pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari dukungan struktural dan administratif. Ini menjadi bentuk nyata dari prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Namun demikian, tahap *using* juga menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan seperti keterbatasan dalam pemasaran, rendahnya literasi keuangan, dan belum meratanya kapasitas teknis menjadi kendala utama. Tantangan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan tidak dapat berhenti pada satu intervensi saja, tetapi harus terus dikembangkan secara bertahap dan sistematis. Perlu ada kebijakan lanjutan yang adaptif terhadap dinamika lapangan.

Secara sosiologis, penggunaan hasil pemberdayaan oleh masyarakat tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan harga diri warga. Ketika warga merasa mampu menghidupi dirinya

dari hasil kerja sendiri, lahirlah identitas baru sebagai individu yang mandiri dan produktif. Transformasi psikososial ini adalah modal penting bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Peran kelompok seperti PKK dan Karang Taruna juga sangat penting dalam menyemai nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong. Keberhasilan kelompok ini dalam memanfaatkan potensi dan mengelolanya untuk kepentingan sosial menunjukkan bahwa *using* tidak selalu bersifat individualistik, melainkan dapat menjadi gerakan kolektif yang memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa, tahap *using* menjadi indikator efektivitas kebijakan pemberdayaan. Ketika masyarakat mulai mengaplikasikan potensi dan pengetahuan dalam kehidupan nyata, maka hal tersebut mencerminkan bahwa program pemerintah telah tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi berbasis dampak nyata di lapangan menjadi penting sebagai umpan balik bagi perumusan kebijakan berikutnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah regenerasi aktor pemberdayaan. Keterlibatan pemuda seperti yang dilakukan oleh Mas Fajar menunjukkan bahwa kalangan muda juga mampu menjadi agen perubahan yang membawa desa lebih adaptif terhadap teknologi dan dinamika pasar. Keterlibatan ini perlu terus ditumbuhkan agar terjadi kesinambungan antar generasi dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, *using* bukanlah tahap akhir dari pemberdayaan, melainkan awal dari fase baru di mana masyarakat harus terus diberdayakan agar potensi yang telah dimiliki tidak stagnan. Pemerintah desa perlu memastikan adanya ruang partisipasi, pendampingan lanjutan, serta integrasi dengan program-program pembangunan lainnya agar masyarakat dapat terus berkembang secara berkelanjutan.



Gambar 3. 6 Pasar Blumbang Mataram

Pasar Blumbang Mataram merupakan bukti konkret keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten. Awalnya merupakan kawasan rawa-rawa yang tidak produktif, para pemuda dan warga setempat, dipelopori oleh Rivaldi Alan Saputra, berhasil mengubah lokasi tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif dan wisata berbasis budaya serta lingkungan. Pasar ini tidak hanya sekadar ajang jual beli, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan UMKM lokal-sejak dimulai dengan 10 UMKM pada 2022, kini sudah melibatkan puluhan hingga ratusan pelaku usaha serta

ratusan pemuda yang bergabung dalam Pokdarwis dan lembaga desa lainnya. Dampak nyatanya terlihat pada peningkatan omzet yang signifikan-dari Rp 3 juta saat awal peluncuran meningkat menjadi Rp 150–180 juta per event-serta ribuan pengunjung, termasuk wisatawan mancanegara.

Akhirnya, berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tahap *using* di Kalurahan Wirokerten telah menunjukkan perkembangan yang positif. Masyarakat mulai menunjukkan inisiatif dan kapasitas dalam mengelola potensi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, dukungan struktural, peningkatan kapasitas lanjutan, serta penguatan kelembagaan masyarakat tetap diperlukan agar keberdayaan yang terbentuk tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi fondasi jangka panjang bagi kemandirian desa.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Pendukung

Menurut Wrihatmolo dan Riant Nugroho (2007), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam buku mereka, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat.

a. Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan akan berhasil jika masyarakat terlibat secara aktif, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai

perencana dan pelaksana program. Ini menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) dan tanggung jawab.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Wirokerten aktif terlibat dalam kegiatan musyawarah desa, pelatihan UMKM, dan gotong royong. Partisipasi tinggi ini mendorong keberhasilan berbagai program seperti pelatihan digital marketing dan pertanian organik.

Tingginya partisipasi menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya pembangunan berbasis masyarakat. Ini selaras dengan konsep *bottom-up* dalam pemberdayaan. Keikutsertaan aktif juga menjadi indikator keberhasilan pendekatan partisipatif yang dijalankan pemerintah kalurahan.

b. Ketersediaan Informasi

Informasi yang terbuka dan mudah diakses membuat masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Misalnya, informasi tentang peluang usaha atau akses bantuan pemerintah.

Pemerintah Kalurahan Wirokerten secara rutin menyampaikan informasi melalui media sosial kalurahan, papan pengumuman, dan grup WhatsApp RT. Hal ini memungkinkan masyarakat menerima informasi dengan cepat, termasuk mengenai bantuan sosial dan program pelatihan.

Transparansi dan akses informasi yang baik menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat dalam membuat keputusan. Ini menunjukkan bahwa kalurahan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, yang menjadi fondasi pemberdayaan.

c. Kepemimpinan Lokal yang Kuat

Pemimpin informal seperti tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat yang dihormati bisa menjadi motor penggerak perubahan. Mereka mampu memberi teladan, membimbing, dan menyatukan masyarakat dalam proses pemberdayaan.

Dukuh dan tokoh masyarakat di Wirokerten berperan aktif sebagai penggerak kegiatan. Misalnya, adanya tokoh pemuda yang memimpin komunitas tani muda dan sukses mengembangkan pertanian hidroponik menjadi inspirasi bagi warga lainnya.

Kepemimpinan lokal menjadi katalisator perubahan sosial. Tokoh lokal yang inspiratif berfungsi sebagai *change agent*, yang mampu memotivasi masyarakat dan membentuk solidaritas kolektif.

d. Kemitraan yang Baik

Kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat menciptakan dukungan yang saling melengkapi. Misalnya, LSM memberi pelatihan, pemerintah memberi bantuan dana, dan masyarakat menjalankan program.

Kalurahan Wirokerten telah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti perguruan tinggi (melalui KKN), LSM lokal, serta dinas kabupaten untuk mengadakan pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan program ketahanan pangan. Kemitraan ini memperkuat daya dukung terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi multipihak menunjukkan praktik *good governance* dalam pengelolaan pembangunan desa. Kemitraan memperluas akses terhadap sumber daya dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat secara internal.

e. Akses Terhadap Sumber Daya

Sumber daya seperti modal usaha, teknologi, informasi, dan pasar sangat penting. Tanpa akses ini, potensi masyarakat sulit berkembang. Misalnya, petani yang diberi akses pupuk murah dan teknologi irigasi lebih produktif.

Warga Wirokerten memiliki akses terhadap modal mikro dari BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) serta lahan pertanian produktif. Selain itu, adanya pelatihan dan pendampingan dalam mengakses bantuan pemerintah juga memperkuat upaya pemberdayaan.

Akses terhadap modal dan alat produksi menunjukkan adanya mobilisasi sumber daya yang efektif. Ketika sumber daya

dikelola secara adil dan merata, maka potensi pemberdayaan meningkat secara signifikan.

2. Faktor Penghambat

Menurut Wrihatmolo dan Riant Nugroho (2007), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam buku mereka, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat.

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang rendah menghambat masyarakat memahami informasi, teknologi, atau peluang yang datang. Ini juga menghambat partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil survei, sebagian warga lansia dan usia produktif belum menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini menjadi kendala dalam pemahaman terhadap pelatihan yang diberikan, terutama pelatihan berbasis teknologi.

Pendidikan rendah mempersempit akses terhadap informasi dan peluang. Ini berdampak langsung pada terbatasnya keterlibatan warga dalam proses pembangunan, terutama yang berbasis teknologi.

b. Kurangnya Kepercayaan Diri

Masyarakat yang lama berada dalam kemiskinan atau marginalisasi sering merasa tidak berdaya. Mereka merasa tidak pantas atau tidak mampu bersaing atau mengubah nasibnya.

Beberapa kelompok perempuan dan lansia di Wirokerten merasa ragu untuk memulai usaha atau mengikuti pelatihan karena merasa tidak cukup berpendidikan atau tidak yakin dengan kemampuannya. Hal ini menghambat partisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi.

Ketidakpercayaan diri ini merupakan hambatan psikologis yang kerap muncul di komunitas marginal. Dibutuhkan pendekatan yang bersifat *empowering*, bukan sekadar *charity-based*, untuk mengatasinya.

Melihat dinamika pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten, peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan bukanlah sekadar penyediaan bantuan atau program pelatihan, melainkan sebuah proses jangka panjang yang menuntut partisipasi aktif, kesetaraan akses, dan perubahan pola pikir. Keberhasilan program-program yang berjalan di Wirokerten membuktikan bahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk terlibat, dipimpin oleh figur lokal yang kuat, serta didukung dengan akses informasi dan sumber daya yang memadai, maka potensi kemandirian akan tumbuh secara alami.

Namun demikian, tantangan seperti budaya paternalistik, ketimpangan distribusi program, serta ketergantungan pada bantuan masih

menjadi hambatan nyata yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, peneliti melihat pentingnya pendekatan yang lebih transformatif dan berkelanjutan dalam setiap upaya pemberdayaan, yaitu dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, memperkuat kepemimpinan lokal, serta menciptakan sistem yang adil dan inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal meningkatkan ekonomi atau keterampilan, melainkan juga soal mengembalikan kontrol dan harapan kepada masyarakat atas kehidupan dan masa depan mereka sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten telah mengalami perkembangan signifikan yang mencerminkan proses bertahap sebagaimana dijelaskan dalam teori Terry Wilson.

Berikut adalah kesimpulan umum dari keempat konsep dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Terry Wilson yaitu *awakening*, *understanding*, *harnessing*, dan *using* dalam konteks implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY.

- 1 Pada tahap *awakening*, pemerintah desa berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, forum warga, dan pelibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh bahwa mereka memiliki hak, peran, dan kemampuan untuk ikut serta dalam pembangunan. Ini adalah fondasi penting dalam proses pemberdayaan yang mendorong partisipasi aktif dan pembentukan identitas kolektif sebagai warga yang memiliki agensi.
- 2 Tahap *understanding* menunjukkan bahwa setelah masyarakat sadar, mereka juga memahami bagaimana struktur, tantangan, dan peluang pembangunan desa bekerja. Mereka tidak hanya tahu bahwa mereka penting, tetapi juga memahami bagaimana menggunakan

peran tersebut secara strategis. Pemerintah desa juga semakin memahami pentingnya sinergi antara kebijakan top-down dan kebutuhan bottom-up. Hambatan seperti keterbatasan literasi, partisipasi semu, dan komunikasi antarwarga mulai dikenali dan dicarikan solusinya.

- 3 Selanjutnya, tahap *harnessing* menggambarkan proses penting dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya yang ada di desa, baik sumber daya manusia, alam, sosial, maupun kultural. Masyarakat dan pemerintah desa mulai menggali potensi tersebut, mengorganisasi dalam bentuk kelompok usaha, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan sektor informal. Kegiatan seperti pelatihan UMKM, pemanfaatan lahan kosong, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda menunjukkan bahwa masyarakat mulai mampu mengorganisasi dirinya.
- 4 Dalam tahap *using*, masyarakat telah mulai mempraktikkan hasil pemberdayaan dalam kehidupan nyata. Berbagai inisiatif warga, mulai dari pembentukan usaha kecil, koperasi wanita, hingga pengembangan produk lokal menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah menjadi bagian dari kultur baru di Kalurahan Wirokerten. Penggunaan teknologi oleh pemuda untuk pemasaran digital dan penggunaan hasil usaha PKK untuk mendanai kegiatan sosial menjadi indikator kuat bahwa pemberdayaan berjalan secara substansial.

Dari keempat tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bukanlah proses instan. Ia menuntut waktu, ketekunan, dan kebijakan yang fleksibel. Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dilewati begitu saja. Kesadaran tanpa pemahaman akan menimbulkan partisipasi semu; penggalian potensi tanpa kesadaran akan memunculkan ketergantungan baru; dan penggunaan hasil tanpa penguatan kelembagaan akan mudah rapuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wirokerten, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan berjalan secara bertahap dan saling berkesinambungan. Untuk memperkuat dan memastikan keberlanjutan proses tersebut, berikut disampaikan beberapa saran yang disusun berdasarkan empat tahap utama dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Terry Wilson, yaitu *awakening*, *understanding*, *harnessing*, dan *using*. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan program pemberdayaan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

1. Pada tahap *awakening*, pemerintah desa sebaiknya terus memperluas dan memperdalam kegiatan sosialisasi serta musyawarah yang bersifat inklusif, dengan menjangkau kelompok yang masih termarjinalkan seperti lansia, difabel, atau warga kurang aktif. Penggunaan media kreatif seperti video pendek, pertunjukan rakyat, atau media sosial

juga bisa dimaksimalkan untuk membangkitkan kesadaran generasi muda terhadap peran mereka dalam pembangunan desa.

2. Tahap *understanding*, perlu adanya program pelatihan rutin yang menitikberatkan pada peningkatan literasi warga, baik literasi digital, finansial, maupun literasi kebijakan. Selain itu, forum komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga harus diformalkan dan dijaga kontinuitasnya agar aspirasi warga benar-benar dipahami dan masuk dalam perencanaan pembangunan desa secara strategis.
3. Tahap *harnessing*, pemerintah desa dapat memfasilitasi pemetaan potensi desa secara partisipatif dan membentuk unit-unit kerja berbasis minat dan kompetensi warga (seperti kelompok tani, kelompok pemuda digital, koperasi perempuan). Selain itu, membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM, atau sektor swasta dapat memperkuat pengelolaan potensi dengan pendekatan ilmiah dan berkelanjutan.
4. Tahap terakhir adalah *using*, keberhasilan yang sudah ada perlu dikonsolidasikan dengan memperkuat kelembagaan, seperti badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, atau kelompok warga. Dokumentasi praktik baik dan replikasi program di dusun-dusun lain di dalam Kalurahan Wirokerten juga penting untuk memperluas dampak. Selain itu, perlu ada sistem monitoring dan evaluasi berbasis komunitas untuk menjamin keberlanjutan inisiatif yang sudah berjalan.

Pendekatan berkelanjutan dan fleksibel harus terus dipelihara agar pemberdayaan tidak hanya bersifat proyek, tetapi menjadi bagian dari budaya pembangunan desa. Integrasi antara kesadaran, pemahaman, pemanfaatan potensi, dan penggunaan hasil harus berjalan harmonis demi menciptakan desa yang mandiri dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal

- Alistair Cole Ahmad. 2008. Governing and Governance in France. *Politics Department School of European Studies Cardiff University*.
- Aprilia, Ria. Kebijakan Pengelola Dana Desa Ditinjau Dari Etika Politik Islam Di Kecamatan Nibung Hangus. Diss. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021*.
- Balitbang Kemendagri. (2019). Panduan Pengelolaan Dana Desa. Kementerian Dalam Negeri.
- Budi, Winarno. (2011). Kebijakan publik (teori, proses, dan studi khasus), Yogyakarta: CAPS
- Eko, S. (2014). Desa Membangun indonesia. Yogyakarta: *Furum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Fajar Rahmatullah. 2021. *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan. Kampus IPDN Jatinangor
- Fausia, Fenny, Abdul Kadir Adys, and Adnan Ma'ruf. "Pengelolaan Dana Desa Di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 6.1 (2020): 85-101.
- Fitriana, A. (2017). Inovasi Kebijakan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 167-176.
- Gunawan, I. (2018). Inovasi Kebijakan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Era Otonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22(2), 132-146.
- Halim, Affandi Rahman, and Artika Taryani. "Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4.1 (2023): 51-71.
- Hanantyo Sri Nugroho, 2020. Inovasi Kebijakan Sebagai Pengembangan Organisasi Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman *JURNAL AGREGASI. Volume 8 – Nomor 2, Desember 2020*.
- Hehamahua, Hayati. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Sosial and Development Sciences* 6 (3): 15-23 ISSN 2221-1152.
- Hidayat, Eet Saeful. "Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten

- Ciamis)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4.2 (2017): 361-368.
- Husna, S., & Abdullah, S., 2016, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa SecaraAKuntabilitas Sesuai Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)", *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 282-293.
- Ika Agustina. 2018. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah/Vol. 6/No. 1/Juni 2018 [19 – 37]*
- Irwandi, Andrizal (2019). Jurnal berjudul Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosial Humaniora. Volume 3 Nomor 2 Desember 2019*
- Kafrini. 2022. Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci) *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), Februari 2022, 391-398.
- Kamal. 2021. Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Jurnal. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*. Volume 2, Nomor 6, Desember 2021
- Kansil, C. S. T. "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa." (1991).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
- Khalida Shuha (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3787>.
- Kurniawan, Yohanes Fredy. Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata: Perspektif Governing (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Diss. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD", 2022.
- Lusiana, A., & Sulistiowati, D. (2018). Inovasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Magelang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 14(1), 21-33.
- Mardiyati, A. (2016). Inovasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(1), 1-13.

- Prasetyo, A. G., Muis, A., & Negara, L. A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
- Rahmah, Dian Waa (2020) Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Thesis, Universitas Islam Riau*.
- Rasman (2021) Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Babana Kecamatan Budong- Budong Kabupaten Mamuju Tengah). *Thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR*.
- Rudiarta, I, K, G., Arthanaya, I, W., Suryani, L, P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (1). 63-67. *Doi: http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1619.63-67*
- Sa'ud, Udin Syaefudin. 2014. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Saiful Islamy. 2020. Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 1, Edisi April 2022*.
- Setio Utomo, Kabul, Sudarmo, Didik G. Suharto. 2018. "Tentang Analisis Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Spirit Publik Vol 13No.1 Hal 50-66*
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV
- Sulpan Aswandi, 2014. "Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014". *Jurnal. Universitas Mataram. Mataram*.
- Suparlan, P. (2019). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3(1), 31-42.
- Syafikri, 2021. Judul: Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Dinamika: *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Volume 8 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2021*.
- Yulita, Rahma, 2016. "Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu".

Peraturan Perundang-udangan:

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2014 membedakan antara Dana Desa dan ADD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/-2014 tentang Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.07/2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Artikel

<http://eprints.umm.ac.id/56113/2/bab%201%20perpuss%20FIX.pdf>, diakses pada 20 Februari 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>, diakses pada 2 Juni 2024.

DOKUMENTASI INFORMAN





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

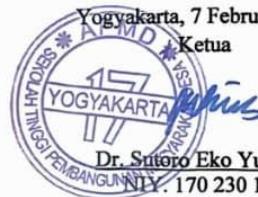
• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 62/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ansarudin
Nomor Mahasiswa : 19520077
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan,
Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Inovasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya
Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Dana
Desa
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 7 Februari 2025
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian,
mohon surat tugas ini diserahkan kepada
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat
Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa
tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax (0274) 515989, website www.apmd.ac.id, e-mail info@apmd.ac.id

Nomor : 123/I/U/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Ansarudin
No Mhs : 19520077
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Inovasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Dana Desa
Tempat : Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Februari 2025
Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
NIPY. 170 230 190



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN WIROKERTEN**

መመንጻዽንዬ ተከሳሽ አዎንታዊ

Kepuh Kulon RT 01 Wirokerten Banguntapan Bantul Telp (0274) 4537496 Kode Pos 55194
Website : <https://wirokerten.bantulkab.go.id> e-mail : desa.wirokerten@bantulkab.go.id

SURAT BALASAN IJIN PENELITIAN
NOMOR: B/500.10.30.1/00167

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang dikeluarkan tertanggal 7 Februari 2025. tentang permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data untuk :

Nama	:	Ansrudin
NIM	:	19520077
Perguruan Tinggi	:	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Adapun kegiatan Penelitian yang diselenggarakan di Wilayah Kalurahan Wirokerten dengan judul skripsi “**INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA**”

Maka dengan ini kami :

= MENGIZINKAN =

Untuk kemudian agar dilayani dengan Sebaik-baiknya, kepada Mahasiswa yang bersangkutan supaya melaporkan diri setelah kegiatan berakhir.

Demikian surat pemberi Izin ini kami sampaikan, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

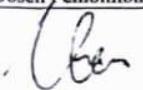
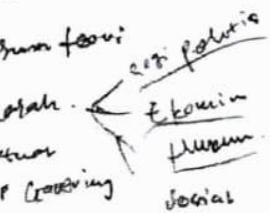
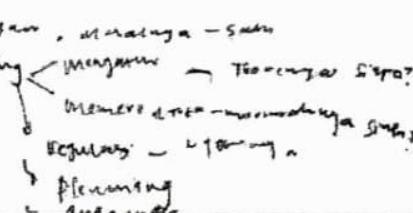
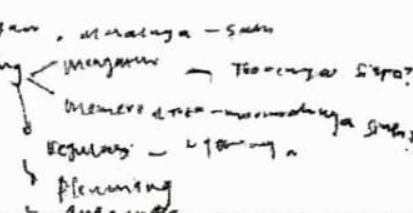
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/TV/2015)

Alamat: Jl. Temploko No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 6502776. Fax. (0274) 5156888. Yogyakarta 55226

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ansarulhaq
Nomor Mahasiswa : 19520017
Judul : Inovasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Dama Desa
Dosen Pembimbing :
Mulai Bimbingan : 16 November 2022.

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
15-11-2022	- Penulisan Makalah Secara Was perihal kajian penelitian sebelumnya - Membatasi Dama Desa. - program Inovasi Dama yang diadakan pemerintahan Desa	 Paraf Firdaus
26 Juni 2023	tb Penelitian ini melahirkan tentang teknologi kebijakan Dama Desa + keadilan - kebijakan Dama Desa - Inovasi Dama Desa - realisasi Dama Desa di lapangan dan bagaimana	 Paraf Firdaus
02-07-2023	- kebijakan Dama Desa/longgolongan/penataan - inovasi kebijakan	 Paraf Firdaus
11 Juli 2023	- Review Gambaran teori 	 Paraf Firdaus
21-07-2023	- Penulisan makalah Kerangka konseptual Melalui model Governing -  - Pengawas dan perwadilan	 Paraf Firdaus
25-07-2023	-  - Pengawas dan perwadilan	 Paraf Firdaus

8 September 2023	Governing Cluster Cilete	Mr. Firdaus
10 - 9 - 2014	- menentukan fungsi lingkup - Pengambilan keputusan - produksi barang publik - distribusi sumberdaya. - perbaikan penulisan yg sistematis	lry.
11-10-2024	→ Revisi judul → Kapasitas pemerintah Desa dan desa Penggunaan Desa - Desa (terhadap Pembentukan Masyarakat) perubahan/Revisi latar belakang. Inovasi kebijakan pemerintahan dalam upaya pembangunan Masyarakat melalui penggulungan Rama Desa.	lry. - lry.
19-10-2024	→ Perubahan judul/penulisan - perbaikan penulisan <u>data dan metode</u> .	lry.
24-11-2024	→ Perbaikan penulisan <u>data dan metode</u> .	lry.
28-2-2025	→ Perbaikan penulisan <u>data dan metode</u> . Latar belakang, <u>landasan teori</u> ,	lry.
5-3-2025	→ <u>proposal di ACC.</u>	
15-5-2025	Perubahan fokus penelitian. H. Terry W. - awakening, - Usting. - Understanding - Harnessing.	DR.
26-5-2025	- Perubahan penulisan Saran menjadi 4. Poin - Perbaikan penulisan sistematik penulisan.	DR.
28-5-2025		DR.
2-6-2025	Acc Ujian Skripsi	DR.

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

.....

Dosen Pembimbing :

DR.

Dr. R. Rizal Samalaisa...